

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang)**

OLEH:

TIKA PUSPITA SARI

NIM.0203171016



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S-1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

TIKA PUSPITA SARI

NIM.0203171016



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang)**

SKRIPSI

Oleh:

TIKA PUSPITA SARI

0203171016

Menyetujui

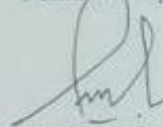
Pembimbing I



Dr. Irwansyah, MH

Nip.198010112014111002

Pembimbing II



Ramadani, MH

Nip.199205152019032013

Mengetahui:

Kepada Jurusan Siyasah

Fak. Syari'ah dan Hukum UIN-SU



Dr. Irwansyah, MH

Nip.198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 September 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara).

Medan, 14 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr.Irwansyah,MH
NIP.19801011 201411 1 002

Sofyati Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

Dr.Irwansyah,MH
NIP.19801011 201411 1 002

Ramadani, MH
NIP. 19920515 201903 2 013

Dr.Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP.19820510 200901 1 014

Dr.Arifuddin MudaHarahap, M.Hum
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr.H.Ardiansyah, Lc,MAg
NIP. 19760216 200212 1 002

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tika Puspita Sari
NIM : 0203171016
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Rakyat, 26 Mei 1999
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110
TAHUN 2016 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Cinta Rakyat,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan didalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 September 2021

Tika Puspita Sari

NIM.0203171016

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”**. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) disebut juga dengan parlemennya desa dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa, oleh karena itu pemilihan keanggotaan BPD menjadi ajang yang sangat penting, oleh sebab itu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan” dan pasal 8 ayat (1) pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan harus memilih minimal 1 orang perempuan sebagai anggota BPD”, sehingga nantinya wakil perempuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan sesuai pasal 8 ayat (2). Dengan demikian pengisian BPD harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun nyatanya di Desa Cinta Rakyat tidak ada seorangpun perempuan yang menjadi lembaga BPD, sehingga implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan tidak terlaksana di Desa Cinta Rakyat. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaimana kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empirise yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada sekretaris desa, kepala dusun, kaur desa, anggota BPD serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Cinta Rakyat belum terlaksana, dikarenakan dari hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan yang terpilih dalam BPD di Desa Cinta Rakyat, karena berdasarkan yang penulis amati bahwa tidak adanya calon perempuan dalam daftar pencalonan anggota BPD dikarenakan budaya patriarkhi yang masih melekat di desa cinta rakyat sehingga masyarakat tidak ada perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi Lembaga BPD, kemudian alasannya ketidaktahuan panitia pemilihan apalagi masyarakat mengenai dasar aturan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD sehingga kurangnya informasi serta tidak adanya sosialisasi oleh masyarakat tentang aturan keterwakilan perempuan dalam BPD. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tugasnya, di dalam pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat ditinjau dari fiqh siyasah belum terlaksana aturan tersebut sebagaimana mestinya.

Keyword: *Implementasi, Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Kedudukan Keterwakilan Perempuan, Desa Cinta Rakyat, Fiqh Siyasah.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)** ”. Sholawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua Ayahanda H.Adi Kustiono, S.Kp,M.Kes dan Ibu Misniarti S.Pd yang dengan ikhlas tanpa keluh kesah mengasuh memberikan kebutuhan selama proses masa studi. Mendidik dan mengasuh penulis mulai dari kandungan sampai sekarang. Dan juga selalu mendoakan yang tak pernah putus dan memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M, Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Dr.Irwansyah M.H, Selaku Ketua Jurusan Siyasah Sekaligus Pembimbing Skripsi I yang sangat luar biasa bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibunda Syofiati Lubis MH, Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Ramadani, M.H, Selaku Pembimbing Skripsi II yang sangat luar biasa bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Ibunda Fatimah, S.Ag,MA, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasehat serta arahan yang sangat luar biasa.

9. Kak Mawaddah Waromah Dan Ibunda Maulidya Mora Matondang, M.Ag yang selalu memberi dukungan, membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar proses administrasi selama proses studi perkuliahan.
10. Bapak Suhendro, ST selaku Kepala Desa Cinta Rakyat, Ibu Sulastri selaku Sekretaris Desa Cinta Rakyat, Aji Kurniawan selaku Kaur Umum Desa Cinta Rakyat, Tokoh Masyarakat Bapak Majikan, yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan bantuan informadata-serta data yang berhubungan dengan penelitian skripsi kepada penulis.
11. Abangda Mu'inun SH, Abangda Putra SH, Kak Rini SH, Kak Dwi SP.d, Kak Delvi SH, Kak Winda SH yang turut membantu dan memberi masukan serta arahan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat yang baik yang senantiasa memberikan semangat, masukan, motivasi dan telah bersedia membantu, serta selalu mendukung Annisa Maimanah Nasution S.Pd, Serin Widya Lestari Amd.Keb, Nur Rarastika S.Pd, Nurul Aulia, Fahrhan Riadhil, Sofyan, Syahril Ramadhan ST, Praka Dedek Setiawan yang telah memberikan warna dan motivasi selama menjalani studi, semoga Allah membalas kebaikannya, Aaamiin.
13. Terkhusus sahabat-sahabatku yang terbaik yang selalu bersama-sama menjalani baik suka maupun duka “Buntit’s Indekost” yang selalu kebersamai selama masa-masa perkuliahan: Ayu Siti Anza, Mega Agustina Habibi, Nurbani Nasution, Silviati Rahayu, Inka Edryani, Dewy Ayu Sarastika, Hartini, Dinda Sri Mahera Desky, Niswatul Khoiryah Panjaitan, Izmi Khairunnisa. Semoga

kita selalu sukses dunia dan akhirat, dan semoga Allah mempertemukan kita di syurganya kelak, Amin..

14. Seluruh rekan-rekan dan Sahabat mahasiswa Siyasah-A angkatan tahun 2017 yang telah memberikan semangat, doa, serta memberi warna dalam hari-hari, semoga kita semua sukses, Aamiin.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 10 September 2021

Penulis

Tika Puspita Sari

Nim.0203171016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Pengertian Implementasi	30
B. Tinjauan Umum Tentang Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan	31
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	32
2. Keterwakilan Perempuan Di BPD	34
3. Ketentuan Aturan Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam BPD Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016	38
4. Sistem Pemilihan Anggota BPD Menurut Permendagri No.110 Tahun 2016	41

C. Tinjauan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di BPD Perspektif Fiqh Siyasah	45
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	45
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah	48
3. Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.....	50
4. Kedudukan Perempuan Di Dalam Pandangan Islam Dalam Hak Berpolitik	52
5. Keterlibatan Politik Perempuan Dalam Fiqh Siyasah	54
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	58
A. Sejarah Desa Cinta Rakyat	58
B. Letak Geografis Desa Cinta Rakyat	59
C. Keadaan Demografis Desa Cinta Rakyat	60
D. Pemerintahan Desa Cinta Rakyat	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	70
A. Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang	70
B. Kondisi/Keadaan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang	80
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.....	82
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	102
RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Cinta Rakyat.....	59
Tabel 2. Orbit Atau Jarak Tempuh Dari Pusat-Pusat Pemerintahan	60
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Cinta Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4. Jumlah Penduduk Per-Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Agama Desa Cinta Rakyat.....	62
Tabel 6. Sarana Tempat Ibadah Desa Cinta Rakyat.....	63
Tabel 7. Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cinta Rakyat	64
Tabel 8. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Desa Cinta Rakyat	66
Tabel 9. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Cinta Rakyat.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan diantara pulau itu terdapat berbagai daerah yang terdiri dari provinsi, Kota Madya dan juga Kabupaten, serta ketingkat Desa mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas maka perlu adanya bantuan pemerintah daerah hingga ke akar rumput dalam menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan memakmurkan rakyat Indonesia.

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemebudayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.¹ Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2 menyatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Ryas Rasyid, *Memaahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006), hlm.4

Pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).² Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga yang penyalurkan aspirasi masyarakat melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Permakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah meenjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dipertegas dan diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan diatur secara lebih khusus dan spesifik dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa).³ Karena itu Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴ Sehingga Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari

² Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 4, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014>
[desa#:~:text=UU%206%20tahun%202014%20tentang%20Desa%20\(UU%20Desa\)%20menyebutkan%20bahwa,pemerintahan%2C%20kepentingan%20masyarakat%20setempat%20berdasarkan,](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014) diunduh pada tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.20 Wib.

³*Ibid*, hlm. 74

⁴ Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 4, diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-110-2016-badan-permusyawaratan-desa>, diunduh pada tanggal 06 Mei 2021, Pukul 14.20 Wib.

pemuka-pemuka masyarakat di desa sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau sering disebut sebagai Parlemennya Desa.⁵

Berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka BPD sebagai lembaga pemerintah desa yang perannya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakatnya dalam menjalankan urusan pemerintahan tentunya harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga nantinya tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara menyeluruh.⁶ Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa. Oleh karena itu musyawarah penetapan anggota BPD ini tidak kalah penting untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa.⁷ Sehingga membuat pengrekrutan Anggota BPD di Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah Desa. Maka pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis. Artinya proses pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu

⁵Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 13.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 "*Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004*", diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diunduh pada tanggal 04 Mei 2021, pukul 21.30 WIB.

⁷Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.10

sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat desa.⁸

Terkait teknis pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di atur secara rinci dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 yaitu Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.⁹ Dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 9 ayat (2) yaitu pemilihan dilakukan dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT) serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.¹⁰ Sedangkan masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk masa keanggotaan BPD dijelaskan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun untuk penentuan jumlah anggota BPD yang diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2 yaitu ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

⁸ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 55 Ayat 1.

⁹ Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 5 Ayat 1.

¹⁰ Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 9 Ayat 2.

banyak 9 (sembilan) dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa..¹¹ Sehingga dpertegas dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.¹²

Demikian pula perempuan, baik sebagai individu maupun golongan mendapat kesejajaran hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban itu dimiliki oleh kaum laki-laki.¹³ Sehingga berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-haknya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan¹⁴. Karena, setiap pribadi manusia dapat dipastikan mempunyai kecenderungan untuk menyamakan bahkan melebihi dengan kawannya yang berprestasi baik. Oleh karenanya perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki sehingga harus diberikan kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki.¹⁵ Keterwakilan perempuan dalam bidang politik, pembangunan maupun pemerintahan terutama pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan tanpa alasan yang

¹¹ Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 5 ayat 2

¹² Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 58 Ayat 1.

¹³ Satjipto Raharjo, *sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

¹⁴ UUD 1945, Pasal 27, diambil dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diunduh pada tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.30 Wib.

¹⁵ Romany Sihitie, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2007), hlm.146.

mendasar dibuat kebijakan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri, prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut :¹⁶

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan, dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- c. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan tanpa membedakan kedudukan dan jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama insan (manusia) dengan segala potensi yang dimilikinya masing-masing dan memberikannya beban hukum yang sama tanpa adanya perbedaan.

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembenaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia dengan

¹⁶ UU No.7 Tahun 1984, Pasal 7, diambil dari https://pih.kemlu.go.id/files/UU_1984_7.pdf, diakses tanggal 05 Mei 2021, Pukul 19.20Wib.

potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan)nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada pembedaan.¹⁷

Kehadiran Islam sebagai penuntun, pembawa kabar gembira dan sekaligus pemberi peringatan bagi manusia, membuat pandangan terhadap perempuan berubah, harkat martabatnya pun naik, dan tindak kekerasan serta kesewenang-wenanganpun dihilangkan. Islam mendeklarasikan laki laki dan perempuan senantiasa berkedudukan sama, Islam pun memberikan perempuan hak-hak syar'iy, hak-hak sipil, hak-hak kemanusiaan termasuk juga hak-hak politik.¹⁸

Dalam Islam kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, yang membedakan hanyalah amal shaleh mereka sesuai dengan disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 97 dan 98. Begitu pula kedudukan keduanya dalam politik, keduanya mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai kebebasan untuk menduduki lembaga politik tentunya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki.

Demikian keterwakilan perempuan penting dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan.

Pengaturan mengenai keterwakilan dalam keanggotaan BPD secara tegas dan spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

¹⁷Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:Gema Insani,2004),hlm.118.

¹⁸ Benni Erick, *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Vol.3, No.2,Desember 2020, hlm.201

tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 6 yang menyatakan “*Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui : pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.*”¹⁹

Melihat aturan diatas maka sudah semestinya setiap desa melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dimana setiap desa memilih 1 (satu) orang perempuan yang duduk menempati sebagai anggota BPD. Seperti yang terkandung didalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 8:²⁰

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Namun di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan yaitu Desa Cinta Rakyat, peneliti menemukan pemilihan menggunakan sistem musyawarah perwakilan dari setiap dusun mewakili 2 orang sebagai pemilih, kemudian siapa yang paling banyak mendapatkan suara maka ia yang akan duduk menempati posisi keanggotaan BPD, namun dalam hal ini masih belum teralisasi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu permendagri pasal 8 ayat 1 tentang minimal 1 kuota keterwakilan perempuan yang menduduki kursi dalam BPD, terlihat dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan untuk memilih Sembilan

¹⁹ Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 6.

²⁰ Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 8.

anggota BPD yang akan menduduki kursi BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan. Namun nyatanya kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD tidak ada seorangpun perwakilan perempuan yang menduduki dalam keanggotaan BPD. Padahal sudah dijelaskan diatas dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 kouta keterwakilan perempuan minimal 1 orang yang harus duduk sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil observasi awal dari informasi sekretaris desa bahwasannya ia mengatakan:

“Masyarakat yang memilih masih banyak kurang pemahaman mengenai aturan yang telah diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 yang seharusnya memilih perwakilan minimal kuota yang duduk satu orang keterwakilan perempuan, yang mana masyarakat masih cenderung berfikir perempuan masih dianggap kurang lazim dalam mengikuti politik. Kemudian menurutnya panitia dari pelaksana juga kurang memahami aturan teknis permendagri tersebut sehingga yang paling unggul (banyak) mendapatkan suara maka ialah yang duduk”.²¹

Selain itu banyak faktor lainnya yang belum diketahui mengapa implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 terkhusus mengenai kedudukan keterwakilan perempuan belum terealisasikan dengan semestinya. Dengan demikian, tentunya jika tidak ada terimplementasi Keterwakilan Perempuan dalam menempati Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka kebijakan yang akan timbul akan tidak pro terhadap perempuan.²² Karena sejatinya keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan, sebab yang mengetahui tentang kebutuhan serta kepentingan perempuan adalah perempuan sendiri, sehingga kepentingan-

²¹ Sulastris, Sekretaris Desa Cinta Rakyat, Wawancara di Desa Cinta Rakyat, 10 Mei 2021.

²² Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.11.

kepentingan perempuan memang harus lebih baik disuarakan oleh perempuan. Oleh karenanya perempuan didalam BPD yang ditujukan untuk dapat meningkatkan hak-hak dan kepentingan perempuan yang dapat diakomodir oleh negara merupakan suatu bentuk keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk negara hukum (*rechtstaat*). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam BPD harus ada keterwakilan perempuan paling sedikit satu, hal ini menjadi kesempatan bagi perempuan dalam memberikan masukan dan inspirasi kepada pemerintahan desa sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD.²³

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah²⁴. Fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara. Maka dalam hal yang berhubungan terhadap implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakililan perempuan dalam pemilihan BPD ini termasuk kedalam kajian Siyasah Dusturiyah. Menurut Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya "*Kontektualisasi doktrin politik islam*" Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain peneran legislasi (menerapkan bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar

²³ Dimas Luqmanul Hakim, *Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa Didesa Gunung Tumpeng Kec.Suruh Dan Desa Bantal Kec.Bancak, Kab.Semarang*, Jurnal Politik, Vol,2,No.1, Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro, maret 2009.

²⁴ Menurut H.A.Djazuli ia mengatakan "*Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudhoratan dalam kehidupan masyarakat dan negara*".

penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah.²⁵ Karena itu, objek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam.

Adapun kajian fiqh siyasah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif ditingkat desa dikatakan sama dengan *ahlu al-halli wa al-aqdi*. *Ahlu al-halli wa al-aqdi* Ibn Taimiyah menyebutnya dengan Ahlul-syawkah. sebagian lagi menyebutkan ahl al-syura atau al-ijma, sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan Al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian “*sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka*”.²⁶ Karena *ahlu al-halli wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Karena itu keberadaan *ahlu al-halli wa al-aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang, menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah islam terutama Al-Quran dan sunah. Dengan demikian Siyasah Dusturiyah ini masuk kedalam bagian *Tashri’iyyah*

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi doktrin politik islam)*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), hlm.177.

²⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.28

adalah salah satu bagian dari Siyash Dusturiyah yang membahas dan mengkaji tentang kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga legislatif.²⁷ Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah yaitu:

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat islam, b) masyarakat islam yang akan melaksanakan, c) isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dari syariat islam.²⁸

Namun aturan yang dibuat pemerintah terkait Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD tidak terlaksanakan di Desa Cinta Rakyat, padahal tertuang dalam al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa': 59).*²⁹

Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa':59 menegaskan bahwasannya harus mentaati pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 Tentang Kedudukan keterwakilan perempuan minimal 1 orang yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas dapat dilihat harus dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Konstektualisasi doktrin politik islam)*, Ibid, hlm.187.

²⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,2005),hlm.80

²⁹ Ayunda, *Tafsir Ayat Surah an-nisa 59*, diambil dari <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Pada tanggal 06 Mei 2021, Pukul 10.50 Wib.

untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah.

Dari pandangan fiqh siyasah dusturiyah seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk kedudukan keterwakilan perempuan. Sehingga jika tidak ada yang mewakili perempuan hak perempuan merasa merugi karena sejatinya keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pastinya memperjuangkan hak-hak perempuan dan politik perempuan dapat lebih mudah diperhatikan, karena yang mengetahui kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang mengapa tidak adanya seorang yang mewakili sebagai keterwakilan perempuan yang menduduki keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan, Sesuai Amanah Permendagri No.110 Tahun 2016. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian lebih lanjut, untuk itu maka penulis mengangkat Judul : **“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN**

**PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”.
(Studi Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa pokok yang penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah. Adapun yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Kondisi/keadaan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu:
 - a) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta diharapkan dapat juga dapat di gunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenisnya atau dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin ilmu Hukum.

- b) Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan masyarakat desa atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsi pustaka dalam siyasah/politik hukum islam.

2. Secara Praktis, yaitu:

- a) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat Desa tentang urgensi implementasi kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai dengan Permendagri No.110 Tahun 2016, karena jika adanya keterwakilan perempuan didalam desa, pastinya sangat membantu untuk memperjuangkan dan menyuarakan hak politik dari perempuan di desa.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan aparaturnya desa dan masyarakat desa dalam menjalankan pelaksanaan pemilihan BPD yang sesuai dengan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD.
- c) Penelitian ini berguna untuk mengetahui penyebab ketidak implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

E. Telaah Pustaka (Kajian Terdahulu)

Sejauh penelitian penulis, sampai saat ini penelitian tentang Keterwakilan Perempuan sudah banyak dilakukan dan juga telah banyak mewarnai dunia keilmuan

pengkajian hukum berdasarkan penemuan suatu masalah. Namun sejauh pengamatan penelitian dan berdasarkan hasil analisis cek bersih judul di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara sampai disusunnya penelitian ini belum ada secara jelas dan spesifik membahas mengenai hal tersebut. Dengan demikian dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan hal ini, sehingga adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap dalam penelitian sebelumnya. Penelitian dahulu yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rahmad Nawawi Lubis (2019) Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN-Sumatera Utara, yang berjudul *“Analisis Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019.”*³⁰

Dalam penelitian skripsi yang dibuat oleh Rahmad Nawawi Lubis ini membahas mengenai analisis keterwakilan perempuan tidak terpenuhi dalam kuota 30% dalam pencalonan legislatif di Kabupaten Mandailing tahun 2019. Dengan demikian dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 mengatur pencalonan legislatif di Kabupaten Madina dan bagaimana realitas pelaksanaan yang dijalani sesuai dengan No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Mandailing tahun 2019.

2. Penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel hukum oleh Alef Musyahadah Rahmah (2019) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

³⁰ Rahmad Nawawi Lubis, *Analisis Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014*, Skripsi Sarjana, (Medan: UIN-SU Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), 2019).

,yang berjudul *“Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas”*.³¹

Hasil penelitian mengkaji Perda Banyumas sudah mengatur keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan BPD, akan tetapi dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan baru, dimana dalam Pasal 73 mengamanatkan pembentukan Perda sebagai peraturan pelaksana Permendagri tersebut, maka Perda Banyumas tentang BPD perlu diganti menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.

3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh Ahmad Wildan Sukhoyyah dkk, yang berjudul *“Pemilihan Wanita Dalam BPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender”*.³²

Penelitian Ahmad Wildan Sukhoyyah dkk membahas tentang pemilihan wanita dalam BPD yang sering disandingkan dengan gender. Namun hasil penelitian bahwa terdapat perempuan yang terpilih dalam pemilihan BPD namun pemilihannya tak lepas dari pengaruh perspektif jender.

Dari judul terhadulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai

³¹ Alef Musyahadah Rahmah, *“Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas”*, Artikel, (Purwokerto:Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum,2019).

³² Ahmad Wildan Sukhoyya dkk, *Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender*,Jurnal Hukum, Vol.7 Nomor 1, fakultas hukum Universitas Diponegoro, Desember Tahun 2014.

dengan **“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. (Studi Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)”**. Sehingga penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam.

F. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

1. Konsep Implementasi

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif misalnya yang menyangkut skripsi ini adalah peraturan berbentuk Permendagri(Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.110 Tahun 2016 dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Teori Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Biddle dan Thomas, keikutsertaan seseorang dalam sebuah aturan atau yang sering disebut dengan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi

perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Itu artinya, laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peluang untuk berperan dalam bidang politik, ekonomi, agama, media dan sebagainya.³³

Dalam jurnal yang berjudul Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec.Suruh Dan Desa Bantal Kec.Bancak Kab.Semarang yang ditulis oleh Dimas Luqmanul Hakim, menjelaskan bahwa Peran serta perempuan dalam politik sangatlah penting karena keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Maka keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan, kepentingan perempuan memang harus lebih baik disuarakan oleh perempuan itu sendiri karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan perempuan.

Dalam pandangan agama pun menurut Ikwan Fauzi juga tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk berperan dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan.³⁴ Hal tersebut senada dengan apa yang telah termaktub dalam Al-quran dimana antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang dibedakan antara memilih atau dipilih untuk dapat mengatur urusan masyarakat (umum), seperti yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³³ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 203.

³⁴ Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan kekuasaan*, *Ibid.*, hlm. 113.

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (At-Taubah : 71).³⁵

Dengan demikian seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat sesuai amanah Q.s An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa': 59).³⁶

Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa':59 menegaskan bahwasannya harus mentaati pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan keterwakilan perempuan yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas dapat dilihat harus dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah.

³⁵ Ima Malia, *Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71*, Skripsi Sarjana, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 5.

³⁶ Ayunda, *Tafsir Ayat Surah an-nisa 59*, diambil dari <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Pada tanggal 06 Mei 2021, Pukul 10.50 Wib.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran data dalam penelitian.³⁷ Dengan demikian, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat.³⁸ Dengan demikian dalam hal ini yuridis yang digunakan yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam hal ini Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD sedangkan empirisnya digunakan untuk menganalisa kejadian lapangan mengapa tidak adanya keterwakilan perempuan minimal 1 orang dalam kedudukan BPD di Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang yang seharusnya ada untuk memperjuangkan wanita.

Oleh sebab itu penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu

³⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 8.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya/nyata yang terjadi di masyarakat untuk meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi³⁹ dan sampel^{40,41}. Maka dalam skripsinya populasinya adalah seluruh komponen yang mengetahui tentang BPD.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode pemikiran yang mendalam tentang suatu subjek di lapangan, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan, Alasan diadakan penelitian di lokasi tersebut antara lain:

³⁹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

⁴⁰ Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

⁴¹ J Lexy, *Metodologi penelitian hukum*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 48

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 104.

- a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

3. Sumber Data

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

- a. **Sumber Data Primer** adalah sumber yang dijadikan objek utama penelitian yaitu: Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun, Anggota BPD, Perwakilan Toko Masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang.
- b. **Sumber Data Sekunder** adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok.⁴³ Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi dan buku-buku, undang-undang dan hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, dan tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum mengenai kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- c. **Sumber Data Tersier** adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder.⁴⁴ Misalnya seperti: Link

⁴³ *Ibid.*, hlm.8.

⁴⁴ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi, Syariah Press, 2011), hlm.178.

Internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, Maka yang dijadikan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Metode Observasi** adalah mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian.⁴⁵Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Desa Cinta Rakyat, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang.
- b. **Metode Wawancara** adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.⁴⁶ Data hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun,

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid 2* (Yogyakarta: Andy Offset, 1986), hlm.124.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum, Ibid*, hlm.107.

Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Tokoh Masyarakat Dari Keterwakilan Wilayah.

- c. **Metode Dokumentasi** adalah mengumpulkan data melalui bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.⁴⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian empiris yang dilakukan berdasarkan kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁸

Kemudian teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis masalah-masalah yang aktual dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara: mengumpulkan data, kemudian setelah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah *editing* yaitu pengecekan data yang telah terkumpul agar terhindar dari kesalahan, selanjutnya *organizing* yaitu mengatur

⁴⁷ *Ibid*, hlm.108.

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penilitin Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Banung: Alfabeta, 2017), hlm. 73

dan menyusun dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian *menganalisa data* yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai Kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tua, Kab.Deli Serdang sehingga dapat menjadi kesimpulan umum.

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini merupakan materi untuk memperjelas dan memperkuat pemaparan skripsi yang diambil. Landasan teori ini terdiri dari pengertian implementasi, tinjauan umum tentang Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan, selanjutnya tinjauan umum tentang keterwakilan perempuan di BPD perspektif fiqh siyasah.

BAB III : Lokasi Penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang yang berisi sejarah Desa Cinta Rakyat, Visi Dan Misi Desa Cinta Rakyat, letak geografis Desa Cinta Rakyat, kondisi Demografis Desa Cinta Rakyat, Pemerintahan Desa Cinta Rakyat.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana hasil implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di desa cinta rakyat, faktor penghambat implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 di desa cinta rakyat, pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi permendagri No.110 di desa cinta rakyat yang berisi prinsip persamaan dan keadilan yang semua ini berasal dari hasil penelitian terhadap pandangan sejumlah pemerintahan desa dan perwakilan tokoh masyarakat yang memilih BPD Desa Cinta Rakyat, Kec.Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah dibahas dari keseluruhan penelitian dan saran sebagai bahan perbaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori, adapun landasan teori yang peneliti jelaskan yaitu *pertama* mengenai implementasi, *kedua* membahas mengenai tinjauan umum tentang permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan, *ketiga* mengemai tinjauan umum tentang keterwakilan prempuan dalam BPD persfektif fiqh siyasah. Dengan demikian maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Soclihin Abdul Wahab adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu, maka istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci⁴⁹ Dengan demikian biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.⁵⁰

Sedangkan secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonessia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴⁹ Soclihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.64.

⁵⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵¹

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses atau pelaksanaan yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan,program atau harapan.

Dengan demikian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.

Oleh sebab itu menurut Mazmanian menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD Terhadap Keterwakilan Perempuan.

⁵¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

⁵² Soelihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, *ibid*, hlm. 56.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a) Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵³

Kemudian BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁴

Lebih lanjut, Menurut Moch Solekhan dalam bukunya yang berjudul *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”* menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁵⁵

⁵³ A.W.Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 76.

b) Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun fungsi dari BPD itu sendiri, yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain:

- a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c. melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi tersebut, BPD juga mempunyai tugas yang telah diatur di dalam Pasal 32 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai tugas, antara lain:⁵⁶

- a.menggali aspirasi masyarakat; b.menampung aspirasi masyarakat; c.mengelola aspirasi masyarakat; d.menyalurkan aspirasi masyarakat; e.menyelenggarakan musyawarah BPD; f.menyelenggarakan musyawarah Desa; g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h.menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, wewenang yang dimiliki oleh BPD di jelaskan dalam Pasal 63 Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

⁵⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 32.

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 63.

kepada Pemerintah Desa; f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h.menyusun peraturan tata tertib BPD; i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat; j.Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; k.mengelola biaya operasional BPD; l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perwakilan merupakan konsep tentang seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Perwakilan adalah orang yang mewakili suatu kelompok dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya. Karena rakyat tidak dapat menjakankan tugas kenegaraan seorang diri butuh seseorang untuk menjadi wakilnya. Maka dari itu rakyat harus mempunyai perwakilan di pemerintahan agar segala kepentingan-kepentingan yang ingin rakyat suarkan dapat disampaikan melalui wakilnya.⁵⁸

Ditingkat desa wakil rakyat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian Perwakilan ada karena rakyat maka wakil-wakil tersebut harus mendengar permasalahan yang di suarkan rakyat kepadanya dengan tujuan rakyat akan percaya kepadanya. Oleh sebab itu,dalam Keanggotaan BPD tidak hanya seorang lelaki, namun keterwakilan perempuanpun dalam BPD sangat diperlukan

⁵⁸ Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak,2012), hlm. 68.

karena yang mengetahui tentang keperluan politik perempuan sampai ke akar-akarnya adalah perempuan sendiri, maka kedudukan keterwakilan perempuan sangat diperlukan pastinya untuk mendukung menyuarakan hak politik perempuan.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menjelaskan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa *“Keterwakilan Perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender”*⁵⁹

Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah dan sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 agustus 1945 dalam pasal 27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: *“segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.⁶⁰

Keterwakilan perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM, dalam pasal 7 Konvensi CEDAW, pasal ini menyoroti non diskriminasi dalam semua aspek kehidupan politik dan publik dan memastikan hak perempuan dalam hal-hal berikut: *“untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di*

⁵⁹ Astrit Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm.28.

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diambil dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 11.20 Wib.

lembaga-lembaga publik, dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan melaksanakannya; dan berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik)”. Inti dari konvensi CEDAW adalah menghentikan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menentukan bahwa setiap undang-undang negara, diminta supaya menghapuskan semua sistem sistem yang membedakan kaum perempuan dengan laki-laki.⁶¹

Demikian dapat dimengerti dari pemaparan diatas dasarnya, perempuan memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan tentang dirinya, termasuk berpolitik. Hasrat sebagai manusia, kesamaan akan kebutuhan membenarkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi ini. Kontestasi politik tidak menitik beratkan pada pembatasan gender, namun beradu dalam ruang kompetensi, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menembus posisi kepemimpinan maka ia akan disebut layak sebagai pemimpin, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga neegara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting suatu bangsa.⁶² Secara kodrati biologis, perempuan memang memiliki perbedaan dengan laki laki. Namun secara politik, ekonomi maupun budaya, peran serta tanggung jawab adalah sama.⁶³

⁶¹ Astrit Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, *Ibid*, hlm. 14.

⁶² Dedi Kurnia Putra, *Media Politik: Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media Dan Publik*, hlm.100.

⁶³ Akhmad Ola Bali, *Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lewopulo, Kec.Witihama, Kab. Flores Timur, Provinsi NTT*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD, 2018,hlm.12.

Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention On the Political Rights*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:⁶⁴

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Sehingga perlu adanya kuota bagi perempuan di setiap politik, apalagi dalam BPD di tingkat Desa yang terjun langsung dalam masyarakat untuk mewakili Desa, sehingga ada anggapan bahwa cukup hanya ada satu kuota perempuan yang dapat mewakili aspirasi perempuan di BPD Desa. Hal ini sangat tidak arif dan salah besar. Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan-pria.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 15.

⁶⁵ Mariam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.10.

3. Ketentuan Aturan Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam BPD Berdasarkan Permendagri No.110 Tahun 2016.

Pengaturan mengenai perempuan dalam keanggotaan BPD yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sebagai pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya merupakan bentuk jaminan perlindungan yang berupa hak bagi perempuan untuk terwakili dalam keanggotaan BPD.⁶⁶

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁶⁷

Perlindungan hukum dengan memberikan jaminan pengaturan berbagai hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk perlindungan hukum yang bersifat *in abstracto*, yang berarti meninjau sejauh mana substansi suatu kaidah atau peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dapat memberikan aturan yang melindungi perempuan.

Pemerintah telah menetapkan secara khusus payung hukum untuk kedudukan keterwakilan perempuan di dalam BPD yaitu Ketentuan aturan keterwakilan perempuan terhadap Badan Permusyawaratan Desa sudah diatur secara khusus dalam

⁶⁶ Alef Musyahadah Rahmah, "*Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas*", Artikel, *ibid*, hlm.635.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi lain dari hukum di indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.110 Tahun 2016 tentang BPD, sebagai berikut:⁶⁸

BAB III
KEANGGOTAAN BPD
Paragraf 1
Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.⁶⁹

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:⁷⁰

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

⁶⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016, diambil dari [20180320091312-permendagri-no-110-thn-2016-ttg-bpd \(4\).pdf](https://www.peraturan.go.id/nl/show/20180320091312-permendagri-no-110-thn-2016-ttg-bpd%20(4).pdf), diunduh pada tanggal 01 Juni 2021, Pukul.10.02 Wib.

⁶⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5.

⁷⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 6.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.⁷¹

Dari peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam keanggotaan BPD yang berbentuk jaminan pengaturan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD melalui peraturan perundangan. BPD itu sendiri merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dengan adanya jaminan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dalam peraturan perundangan, maka perempuan mempunyai kesempatan untuk mempunyai suara sebagai wakil yang permanen dalam ikut merumuskan dan menentukan kebijakan pemerintahan desa. Dengan keikutsertaan perempuan sebagai wakil rakyat diharapkan dapat juga mewakili kepentingan perempuan sehingga dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi perempuan khususnya untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan desa.⁷²

⁷¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 8.

⁷² Alef Musyahadah Rahmah, *"Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan Di BPD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas"*, Artikel, *ibid*, hlm.683.

4. Sistem Pemilihan Anggota BPD Menurut Permendagri No.110 Tahun 2016.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"nya desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁷³

Dengan demikian, calon keanggotaan BPD harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Pasal 13 yaitu:

Persyaratan calon anggota BPD adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Kemudian didalam Pasal 10 Permendagri No.110 Tahun 2016 menjelaskan yaitu:⁷⁴

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

⁷³ Andrian Prayoga, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung*, Skripsi Sarjana, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008), hlm. 1.

⁷⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 10.

Keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan ditingkat desa yang dalam prosesnya dipandang sebagai salah satu alat ukur terselenggaranya demokrasi dalam suatu desa, karena dalam pengisian anggotanya partisipasi politik masyarakat desa dapat terlihat secara nyata dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menentukan wakil-wakilnya.⁷⁵

Salah satu semangat munculnya Undang-Undang Desa serta secara khusus diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 adalah menyemarakkan demokratisasi di level desa. Peraturan tersebut mendorong semua unsur masyarakat terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat desa. Tidak terkecuali kelompok perempuan, karena demokrasi tak mungkin meninggalkan keterwakilan perempuan.⁷⁶

Pengisian anggota BPD berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan secara demokratis.⁷⁷ Artinya proses pelaksanaan pengisiannya harus dilaksanakan dengan pemilihan oleh masyarakat itu sendiri, karena BPD merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu ditegaskan dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 yaitu pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu: Pemilihan Anggota BPD secara langsung dan/atau pemilihan Anggota BPD

⁷⁵ *Ibid*, hlm.2.

⁷⁶Enggita Arisca, *Implementasi Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPDO Di Desa Masam Bulu, Kab.Lahat*, Skripsi Sarjana, (Universitas Sriwijaya Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2020), hlm. 2.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 Ayat (1).

secara musyawarah perwakilan.⁷⁸ Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.⁷⁹

Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan keuangan desa.⁸⁰

Namun berdasarkan Pasal 6 Permendagri No.110 Tahun 2016, pengisian anggota BPD harus memperhatikan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Yang mana dalam hal ini dipertegas dalam pasal 7 tentang keterwakilan wilayah dan pasal 8 tentang keterwakilan perempuan dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 yaitu:⁸¹

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 ayat (1).

⁷⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.215.

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 ayat (2).

⁸¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 7 dan 8.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Kemudian untuk anggota BPD yang terpilih serta peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati/Walikota,⁸² maka dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Permendagri No.110 Tahun 2016 yaitu:⁸³

⁸² *Ibid*, hlm.216.

⁸³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 12 dan 14.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Wali kota mengenai peresmian anggota BPD.

C. Tinjauan Umum Tentang Keterwakilan Perempuan Di BPD Perspektif Fiqh

Siyasah

1. Fiqh Siyasah

a) Pengertian Fiqh Siyasah

Pengertian Fiqh berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* artinya “paham yang mendalam”.⁸⁴ Fiqh secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan Fiqh secara terminologis mengetahui hukum syara yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil dalilnya yang terperinci.⁸⁵

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 2.

⁸⁵ Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* (Medan: Cv Manhaji), hlm.1.

Pengertian Siyasah secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut terminologi adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁸⁶

Ilmu fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum.⁸⁷

Berdasarkan pengertian fiqh dan siyasah dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menghindari kemudratan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸⁸

b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.3

⁸⁷ Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 10.

⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, *Ibid*, hlm.3

Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁸⁹

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut;⁹⁰

- a. kebijakan tentang peraturan peundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), b. kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*), c. kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*), d. kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), e. kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*), f. kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*), g. politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*), h. politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Sementara menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Al-Ahkamu Al sulthaniyyah* bahwa ruang lingkup fiqh siyasah ada lima, sebagai berikut:⁹¹

- a. Peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), b. ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), c. Peradilan (*Siyasah Qadha'riyyah*), d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), e. administrasi Negara (*Siyasah Idriyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

⁸⁹ *Ibid*, hlm.13.

⁹⁰ *Ibid*, hlm.13.

⁹¹ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hlm. 4.

a. peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), b. administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*), c. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), d. hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah*).

Adapun Abdul Wahab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang yaitu :⁹²

a. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), b. hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah*) dan c. keuangan negara (*Siyasah Maliyyah*).

2. Siyasah Dusturiyah

a) Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yaitu *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi).⁹³ Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*kostitusi*).⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan

⁹² Abdul Wahab Khallaf, *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*, (Tk. Darul Qalam, 1988), hlm. 4.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, *Ibid*, hlm. 187.

⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 281.

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbalbalik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.⁹⁵

Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹⁶

b) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁹⁷ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:⁹⁸

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisassi Doktrin Politik Islam*, *ibid*, hlm.177.

⁹⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.47.

⁹⁷ *Ibid*, hlm.48.

⁹⁸ *Ibid*.

a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. c. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut persoalan:

a. Imamah, hak dan kewajiban, b. rakyat, hak dan kewajibannya, c. *bai'at*, d. *waliy al-ahdi*, e. Perwakilan, f. *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, g. *wizarah*.⁹⁹

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasanya obyek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.¹⁰⁰

3. Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sultah tasyri'iyah*, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *al-sultah tasyri'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa.¹⁰¹

⁹⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm.25.

¹⁰⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, *ibid*, hlm.27.

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisassi Doktrin Politik Islam*, *ibid*, hlm.163.

Dalam wacana fiqh siyasah, istilah majelis syura atau *al-sultah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam hal ijtihad para anggota lembaga legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Dalam lembaga legislatif para anggota akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di masyarakat.¹⁰²

Dalam ketatanegaraan Islam legislatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan cara musyawarah. Bentuk musyawarah itu dikenal dengan *ahlul halli wal aqdi*, yang mereka telah di percaya oleh rakyat dengan keilmuwan dan kecendikiawan mereka serta keikhlasan mereka juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk ulil amri yang Allah SWT mewajibkan untuk mentaatinya.

¹⁰² La Samsu, *Al-Suultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, Tahkim*, Vol.XIII, No.1, Juni 2017, hlm.158.

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi ini adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Oleh sebab itu, *Ahl al-hall wa al-aqd* ialah sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang mendapat kepercayaan dari umat untuk mewakilinya, umat islam, cerdik pandai, dalam hal ini yang mempunyai kedudukan dalam mewakili masyarakat, dipercaya oleh seluruh rakyat sehingga peraturan mereka nanti akan ditaati serta diikuti oleh seluruh rakyat¹⁰³ Adapun tugas dari *Ahlul Hall wa al-Aqdi* yakni: a. Memilih dan membaiaat pemimpin, b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat, c. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-quran dan Hadits, d. Mengawasi jalannya pemerintahan.

4. Kedudukan Perempuan Menurut Konsep Islam Dalam Hak Berpolitik

Islam menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggungjawab secara umum dalam politik. Agama Islam terhadap perempuan sangat adil dan proporsional. Islam sangat menghargai kedudukan perempuan sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat mengikuti hak berpolitik.¹⁰⁴

Dengan demikian, dahulu sebelum Islam datang (zaman jahiliah) kedudukan kaum perempuan sangat direndahkan. Setelah agama Islam datang, diseimbangkan

¹⁰³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.66-67.

¹⁰⁴Nurhikmah, Hak-hak politik iwanita dalam islam, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/285729-hak-hak-politik-wanita-dalam-islam-e9744c2a.pdf>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021 Pukul 10.20 Wib.

(dinaikan) derajatnya. Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, hal itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Quran yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Qs. Az-Zariyat ayat 56).¹⁰⁵

Dalam banyak hal, perempuan diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat perempuan, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya.

Dalam konteks ini, sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruhnya yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dalam sejarah Islam juga terlibat bahwa kedudukan kaum perempuan bisa mewakili menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah pendapat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah (istri Rasulullah SAW) dalam peristiwa Hudaibiyah saat memberikan sarannya kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada

¹⁰⁵ Zahrani, Al-Quran Surat Az-Zariyat Ayat 56, diambil dari <https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>, diunduh Pada tanggal 14 Juni 2021, Pukul 12.03 Wib.

saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak yang berwenang, meskipun sang penguasa itu sedang di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin al-Khathab.¹⁰⁶

5. Keterlibatan Politik Perempuan Dalam Fiqh Siyasah

Dalam analisa politik modern, keterlibatan politik secara umum didefinisikan sebagai tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta berkecimpung secara aktif dalam kebijakan politik yang telah diatur oleh pemerintah.¹⁰⁷

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan dibidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam *fiqh siyasah* tidak disinggung perempuan dalam politik baik sebagai objek maupun subjek. Akan tetapi di dalam Islam terdapat pembahasan mengenai pentingnya perempuan dibidang politik.

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam Islam. Di antara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini

¹⁰⁶ Yusuf al-qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, (Jakarta: al-kautsar, 2008), hlm.222.

¹⁰⁷Wikipedia, Partisipasi politik, diambil dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi_politik, Tanggal 18 Juni 2021, Pukul.16.20 Wib.

dapat dipahami dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusannya.¹⁰⁸

Dalam bidang politik, Islam memberikan akses yang luas dan adil bagi perempuan dengan membuka lebar aktifitasnya di berbagai bidang politik seperti menyampaikan aspirasi, ikut serta dalam politik serta aktifitas lainnya. Demikianlah Islam telah memberikan kebebasan yang sangat besar kepada perempuan untuk berkiprah di ruang publik.

Lembaga yang bertugas menentukan kebijakan publik lazimnya disebut lembaga legislative atau jika ia ditingkat desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), didalamnya terdiri dari perwakilan elemen masyarakat. Dalam Islam lembaga ini sering disebut dengan *ahl al-halli wa al-aqd*. Walaupun tidak sepenuhnya sama, namun salah satu tugas dan fungsi lembaga ini menyerupai lembaga legislative, yakni melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.¹⁰⁹

Peran publik merupakan peran politis yang penting bagi pemberdayaan dan pembangunan manusia seutuhnya. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa nabi ditemukan sejumlah aktivis perempuan yang berkompeten setara dengan kaum laki-laki. Berdasarkan pada al-Qur'an perempuan dengan bebas memasuki semua sektor publik. Perempuan diberi kesempatan untuk berekspresi, baik untuk berargumentasi maupun berbicara di ruang publik, dari yang menjadi mediator

¹⁰⁸ Ahmad Muhaimin, *Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta*, Jurnal Politik, Februari, 2016, hlm. 218.

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, *ibid*, hlm.164.

konflik, memberikan perlindungan dan suka politik, melakukan baiat sampai berjihad.¹¹⁰

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya Alquran dan hadis hanya mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-taubah ayat 71 yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S At-taubah ayat 71)

Kata *auliya* dalam ayat tersebut, menurut *Quraisy Syihab*, mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.¹¹¹

Dalam Islam, perempuan dibenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana

¹¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi : Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.44.

¹¹¹ Nasaruddin Umar, *Akhlaq Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Illahi, 2006), hlm.314.

terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya..¹¹²

Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. *Mustafa as-Siba'* berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang keikutsertaan perempuan dalam merumuskan kebijakan publik (undang-undang). Sebab, pembuatan undang-undang niscaya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan..¹¹³

Sehingga urgensi adanya keterwakilan keanggotaan perempuan di lembaga legislatif adalah untuk mengakomodir beberapa aspek yang berkaitan dengan perempuan. Karena para ulama menyepakati bahwa ada beberapa hal dalam masalah perbuatan hukum (kebijakan publik) yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga yang perlu ditanggapi langsung oleh perempuan. Oleh karena itu keanggotaan perempuan di legislatif merupakan keniscayaan yang harus ada dalam bingkai politik dan harus diapresiasi dengan baik..¹¹⁴

Dengan demikian, tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk tidak membolehkan perempuan dalam ranah politik, asalkan hal itu halal dan mereka sanggup dengan terjaganya batasan-batasan syariat.

¹¹² *Ibid*, hlm.315.

¹¹³ Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.538.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.542

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DESA CINTA RAKYAT, KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Cinta Rakyat

Desa Cinta Rakyat mulai berdiri pada tahun 1950, didirikan oleh SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri) oleh Abdul Sa'i (Ketua), Saet Salim dan usman dan dibantu oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) oleh Joyo Sumarto. Awalnya Mereka bertempat tinggal di desa Palo Ibus Percut, namun karena daerahnya sangat rentan terhadap hama dan penyakit maka pimpinan ketua organisasi tersebut membuka lahan/areal untuk menetap tinggal mereka, maka tanah ini bekas perkebunan PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) IX, Diteruskan dengan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) IX dan sekarang bernama PTPN II Saentis, namun pada saat itu para pemimpin/pejuang tanah tersebut ditangkap oleh pengurus perkebunan dan di tahan di Labuhan Deli Belawan.

Namun pada tahun 1955-an juga, para pejuang tanah memperoleh hasil dimana tanah dipasar V Saentis dikeluarkan oleh para pengurus perkebunan dengan batas tanah aliran sungai jernih sampai dengan pasar V yang sekarang disebut dengan jalan Trunojoyo. Tak henti-henti perjuangan jalan berjalan terus

(operasional) tanah yang terletak di pasar IV sampai pasar III dikuasai langsung oleh masyarakat. Selanjutnya karena perjuangan sudah aman pada tahun 1969 dibentuklah nama Desa Cinta Rakyat artinya rakyat cinta terhadap masyarakat yang gigit berjuang.¹¹⁵

B. Letak Geografis Desa Cinta Rakyat

Desa Cinta Rakyat adalah salah satu Desa dari 20 (Dua Puluh) Desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Cinta Rakyat terdiri dari 11 (Sebelas) Dusun. Desa Cinta Rakyat memiliki luas wilayah 1,526 Ha, dengan total jiwa terdiri dari 13.845 jiwa, terletak di dataran pantai timur Sumatera Utara beriklim sedang dengan permukaan tanah datar berketinggian 5-20 M diatas permukaan laut, Curah Hujan 200 mm/thn. Suhu udara sedang bergerak dari suhu 27°C sampai suhu 33°C dan kelembaban udara 75%-80%. Serta memiliki iklim tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau.¹¹⁶

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Cinta Rakyat

No	Arah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Desa Percut Dan Desa Tanjung Rejo.
2	Sebelah Timur	Desa Sungai Jernih Dan Desa Bandar Sidoras.
3	Sebelah Selatan	PTPN-2 Desa Sentis
4	Sebelah Barat	PTPN-2 Desa Sentis

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Cinta Rakyat.

¹¹⁵ Sumber Arsip Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, hlm. 2.

¹¹⁶ Monografi Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2021.

Tabel 2. Orbit atau jarak tempuh dari pusat-pusat pemerintahan

No	Pusat Pemerintahan	Jarak Tempuh
1	Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan	± 22 Km
2	Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	$\pm 27,8$ Km
3	Jarak dari Pusat Pemerintah Sumatera Utara	± 195 Km.

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Cinta Rakyat.

C. Keadaan Demografis Desa Cinta Rakyat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografis adalah ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan.¹¹⁷ Dengan demikian berbicara mengenai keadaan demografis, berarti berbicara tentang keadaan penduduk, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kependudukan

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari staf Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa penduduk Desa Cinta Rakyat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Cinta Rakyat Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin(L/P)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	7.041 Jiwa	50,86%

¹¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.212.

2	Perempuan	6.804 Jiwa	49,14%
	Jumlah	13.845 Jiwa	100%

Sumber: Data Rekapitulasi Potensi Desa Cinta Rakyat Tahun 2021

Tabel 3 di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan penduduk masyarakat Desa Cinta Rakyat menurut jenis kelamin pada tahun 2021 sebesar 13.845 jiwa, dengan rinciannya adalah jumlah penduduk masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7.041 jiwa atau 50,86%, dan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 6.804 jiwa atau 49,14%. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cinta Rakyat yaitu :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Per-Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	I	698	620	1.318
2	II	604	583	1.187
3	III	902	894	1.796
4	IV	494	438	932
5	V	554	556	1.110
6	VI	592	534	1.126
7	VII	557	595	1.152
8	VIII	499	558	1.057
9	IX	695	613	1.308
10	X	749	698	1.447
11	XI	697	715	1.412
	JUMLAH	7.041	6.804	13.845

Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri Desa Cinta Rakyat Tahun 2021

2. Agama

Agama yaitu tuntunan bagi manusia. Maka jika manusia salah dalam mendalami dan menghayati agama, maka akan salah pula kehidupan yang ia jalani karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, dalam agama yang di tuntut adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepadanya, dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna ikatan-ikatan yang harus di pegang dan di patuhi oleh manusia.¹¹⁸

Dengan demikian, agama dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Peranan agama dalam masyarakat pada kehidupan manusia itu sendiri sangat berperan. Kondisi keagamaan suatu wilayah sangat penting untuk melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama mereka.¹¹⁹

Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek keagamaan yang ada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Agama Desa Cinta Rakyat

No	Agama	Jumlah Jiwa	Presentase (%)
1	Islam	13.561	97,94%
2	Katolik	-	0%
3	Kristen	247	1,7%
4	Hindu	4	0,02%

¹¹⁸ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm.111.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.113.

5	Budha	33	0,23%
	JUMLAH	13.845	100%

Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri Desa Cinta Rakyat, 2021

Dari tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Cinta Rakyat adalah beragama islam. Mayoritas penduduk desa cinta rakyat menganut agama islam sebanyak (13.561 jiwa), agama katolik sebanyak(0 jiwa) , agama Kristen sebanyak (247 jiwa) , agama hindu sebanyak (4 jiwa) dan agama budha sebanyak (33 jiwa). Namun dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Cinta Rakyat pasti adanya sarana ibadah dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 6. Sarana Tempat Ibadah Desa Cinta Rakyat

NO	JENIS SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	3
2	Musholla	12
3	Gereja	-
4	Klenteng	-
Jumlah		15

Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri Desa Cinta Rakyat, 2021

Berdasarkan tabel 6 diatas, ternyata sarana ibadah yang paling banyak tersedia di Desa Cinta Rakya yaitu untuk ibadah orang muslim. Karena mayoritas yang paling umum penduduk Desa Cinta Rakyat menganut agama islam sebanyak (13.561 jiwa), agama katolik sebanyak(0 jiwa) , agama Kristen sebanyak (247 jiwa) , agama hindu sebanyak (4 jiwa) dan agama budha sebanyak (33 jiwa).

3. Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian)

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹²⁰

Secara umum, perekonomian masyarakat Desa Cinta Rakyat ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian lainnya. Berikut kondisi perekonomian Desa Cinta Rakyat dibawah ini:

Tabel 7. Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cinta Rakyat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Presentasi
1.	Petani	332	7,76%
2	Nelayanan	27	0,63%
3.	PNS	88	2,05%
6.	Buruh	2.719	63,61%
7.	Wiraswasta	1.108	25,92%
	Jumlah	4.274	100%

Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri Desa Cinta Rakyat, 2021

Dari tabel 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Cinta Rakyat berbeda-beda, namun mayoritas masyarakat Desa Cinta Rakyat bekerja sebagai Buruh. Karena pada umumnya masyarakat Desa Cinta Rakyat dilihat dari pendidikan masih relatif rendah, dan pada umumnya mayoritas hanya tamatan

¹²⁰ M.Jakfar Puteh, *Sumber Ekonomi Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2019), hlm. 35.

SMP, maka dari itu masyarakat banyak bekerja sebagai buruh untuk mata pencaharian sehari-hari.

4. Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting, dimana dengan adanya pendidikan seseorang secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlakukan dirinya dan masyarakat, bahkan dalam bangsa dan bernegara. Majunya negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh negara tersebut.¹²¹

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat di junjung tinggi.

Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui persentase pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

¹²¹ Merly Cahaya, *Pendidikan Generasi Bangsa Indonesia*, Vol II No.1, Desember 2019, hlm. 215.

Tabel 8. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Desa Cinta Rakyat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1	SD/MI	2.342	16,91%
2	SMP/MTS	7.819	56,47%
3	SMA	1.045	7,54%
4	SARJANA	204	1,47%
8	BELUM/TIDAK SEKOLAH	2.435	17,58%
	Jumlah	13,845	100%

Sumber : Data Rekapitulasi Potensi Diri Desa Cinta Rakyat, 2021

Penjelasan tabel 8 diatas dapat dipahami bahwa di Desa Cinta Rakyat, Taraf pendidikan masih relatif rendah. Jika dilihat berdasarkan tabel diatas pendidikan rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dalam pendidikan masyarakat masih sangat kurang memperhatikan pendidikan masa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah presentase tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Cinta Rakyat. Pada umumnya alasannya karena faktor ekonomi dan budaya lingkungan yang mempengaruhi. Sehingga masyarakat Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang masih butuh kesadaran untuk generasi penerusnya yakni dengan memperhatikan pendidikan mereka.

5. Adat Dan Budaya

Indonesia merupakan negara yang didiami oleh banyak penduduk yang berlainan suku, ras, budaya, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam, oleh karena itu Indonesia juga disebut dengan negara multikultural. Multikultural merupakan suatu keyakinan atau idiologi agar bisa saling menerima perbedaan

agama, politik, etnis dan perbedaan lainnya, yang dilakukan individual maupun kelompok.¹²²

Begitu juga dengan Masyarakat Desa Cinta Rakyat terdiri atas beraneka ragam suku, ras, kepercayaan, budaya, bahasa dan adat istiadat.

Akibat dari keberagaman tersebut banyak menimbulkan perbedaan kebudayaan dalam masyarakat. Penduduk Desa Cinta Rakyat ialah masyarakat yang heterogen, yang penduduknya 90% adalah suku Jawa. Adapun suku lain seperti: Batak, Mandailing, Minang, Melayu dan sebagainya adalah pendatang dari berbagai daerah. Dari tempat asal mereka membawa adat istiadat tradisi yang berbeda dengan penduduk asli di Desa Cinta Rakyat. Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat, karena pada umumnya adat yang dibawa tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Misalnya seperti budaya saat melangsungkan pernikahan yang selalu memakai adat bawaannya. Walaupun terlihat banyak perbedaan dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya mereka tidak pernah keberatan akan budaya-budaya yang berlaku setiap harinya, bahkan akibat dari banyaknya perbedaan tersebut bisa membuat daerah menjadi semakin maju dan lebih berkembang.

Namun Desa Cinta Rakyat pada umumnya mayoritas selalu menggunakan adat Jawa seperti:

- a. Upacara Selamatan adalah untuk mendoakan para leluhur agar diberi ketentraman.

¹²² Rosmaida Sinaga, Lister Eva Simangunsong dan Syarifah, *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 11.

- b. Upacara Tingkebon adalah untuk seorang wanita hamil 7 bulan agar kehamilannya selamat hingga proses persalinan.
- c. Tradisi nikah yaitu siraman, temu penganten, upacara sungkeman dan lainnya
- d. Tdek Siten adalah upacara untuk bayi belajar jalan/turun tanah, hal ini untuk rasa syukur orang tuanya atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa menapakki alam sekitarnya.

D. Pemerintahan Desa Cinta Rakyat

1. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan di Desa Cinta Rakyat terdiri dari beberapa kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Desa Cinta Rakyat. Adapun kelembagaan masyarakat di Desa Cinta Rakyat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 9. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Cinta Rakyat

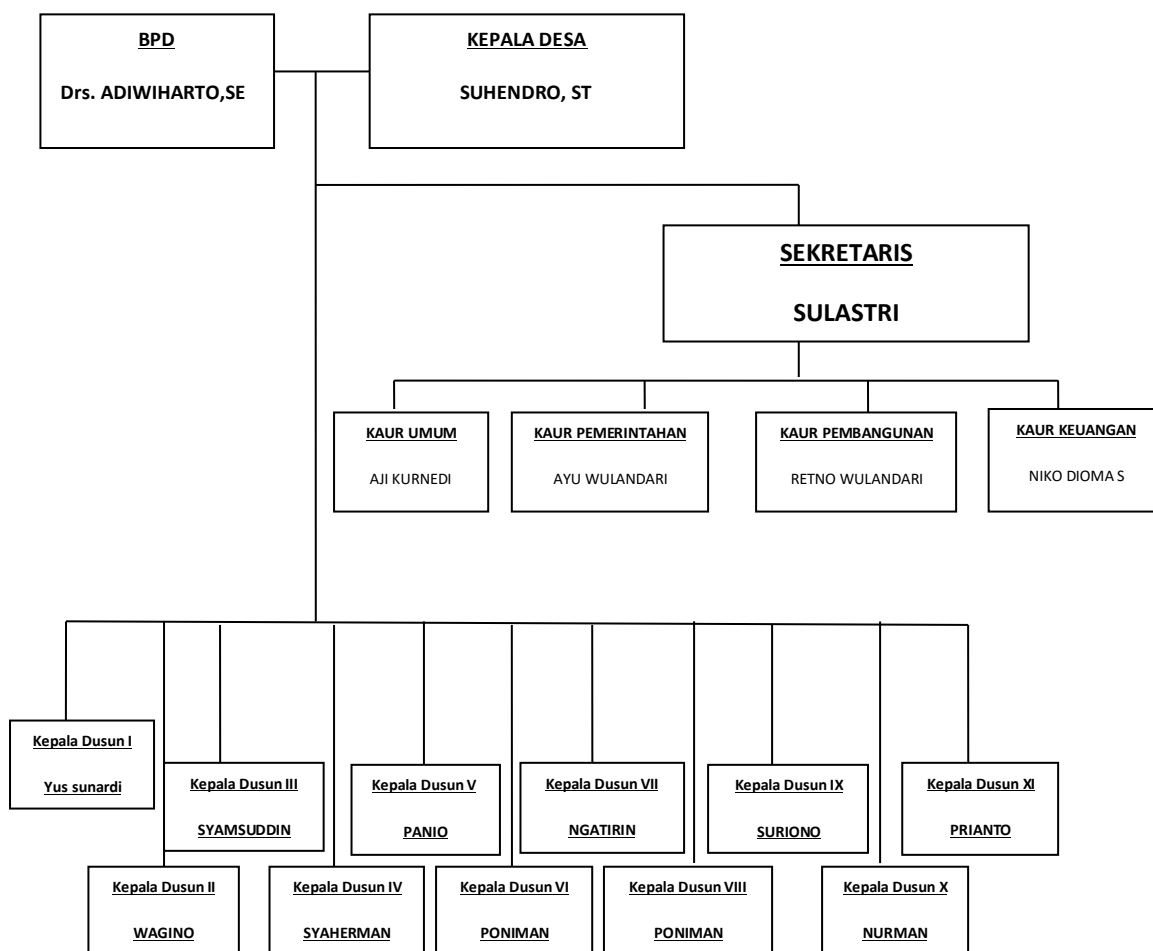
No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	LPM	1 Kelompok
2	PKK	1 Kelompok
3	Posyandu	10 Kelompok
4	Kelompok Tani	5 Kelompok
5	Karang Taruna	1 Kelompok
6	Ormas/LSM	4 Kelompok

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Cinta Rakyat.

Dari tabel 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Cinta Rakyat terdapat Kelembagaan masyarakat yang paling banyak adalah lembaga posyandu karena posyandu tersebut terdapat di setiap dusun yang ada di Desa Cinta Rakyat.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cinta Rakyat

Desa Cinta Rakyat saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Suhendro ST dan dibantu para staf serta lembaga-lembaga di Desa Cinta Rakyat untuk menjalankan pemerintahan, adapun struktur pemerintahan yang ada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:



(Sumber : Balai Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Implementasi merupakan upaya untuk menjalankan dan menerapkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai suatu ketertiban dan keteraturan, sehingga tujuan dari peraturan tersebut terlaksana dengan baik. Namun berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat tidak terlaksa sebagaimana yang terjadi di lapangan. Padahal kedudukan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, pastinya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, sebab yang lebih mengetahui tentang perempuan adalah perempuan sendiri.

Keterlibatan perempuan dalam kancah pengambilan keputusan merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong kebijakan publik yang berkeadilan dan pro terhadap perempuan. Suatu kebijakan baik legislasi maupun kebijakan lain, akan berpihak pada perempuan hanya jika ada *engagement* para perempuan, karena para perempuanlah yang lebih memahami keperluan subyektifnya yang akan berdampak langsung dan tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan.¹²³

¹²³ Ida Fauziah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm.117.

Oleh karena itu, pada dasarnya Keterwakilan Perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa sudah di atur di dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:¹²⁴

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Berdasarkan hal diatas, anggota BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Dimana peraturan tersebut mengharuskan di setiap desa untuk menyertakan satu perempuan sebagai anggota BPD melalui

¹²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5,6 dan 8.

mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan panitia pemilihan BPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi nyatanya peraturan yang sudah ditetapkan masih belum terlaksana, hal ini jika dilihat tidak ada seorangpun keterwakilan perempuan yang menduduki sebagai Anggota BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sulastris, selaku sekretaris Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang didapat penjelasan mengenai tidak adanya keterwakilan perempuan yang menduduki dalam BPD sebagai berikut:¹²⁵

“Kurang minatnya perempuan dalam mengikuti lembaga pemerintahan yaitu Lembaga BPD, Karena perempuan masih kurangnya pengetahuan dan pada umumnya perempuan selalu menganggap yang layak menduduki lembaga pemerintahan desa (BPD) adalah laki-laki, oleh karena itu dari 11 dusun di desa cinta rakyat tidak ada satupun perempuan yang ikut mencalonkan diri dalam Anggota BPD”

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun X Desa Cinta Rakyat, yaitu Bapak Nurman Bagong, ia mengatakan:¹²⁶

“Masyarakat desa masih bercorak patriarkis atau lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan publik”.

¹²⁵ Sulastris, Sekretaris Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi. Cinta Rakyat, 01 September 2021.

¹²⁶ Nurman Bagong, Kepala Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Penulis juga menanyakan kepada KADUS III, yaitu bapak ending apakah di setiap pemilihan anggota BPD Desa Cinta Rakyat selalu tidak ada calon perempuan atau hanya disaat pemilihan tahun 2020 saja, namun ia mengatakan:¹²⁷

“Sebelum pemilihan tahun 2020 sebenarnya BPD Desa Cinta Rakyat, mempunyai satu anggota perempuan yang bertugas sebagai peran wanita BPD, hanya saja anggota perempuan tersebut dirasa kurang efektif dalam menjalankan tugasnya dimana setiap ada rapat kerja anggota BPD untuk membahas dan menyaring segala aspirasi masyarakat Desa Cinta Rakyat selain dilakukan di kantor desa juga terkadang dilakukan di rumah salah satu anggota BPD yang lain di malam hari, jadi perempuan sangat merasa keberatan”

Dari penjelasan salah satu KADUS diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kemunduran partisipasi perempuan dimana sebelum pemilihan anggota BPD pada tahun 2020 sudah ada perempuan yang terlibat dalam kepengurusan anggota BPD yang menjabat sebagai peran perempuan BPD meskipun dianggap belum optimal dalam menjalankan kewajibannya karena berbagai kemungkinan kendala yang dihadapi.

Padahal perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan. Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada sehingga memungkinkan dirinya dapat berpartisipasi dalam pembangunan, politik maupun pemerintahan.¹²⁸

Oleh karena itu, keterwakilan perempuan sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat menduduki suatu jabatan di pemerintahan Desa Cinta

¹²⁷ Ending, Kepala Dusun III Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

¹²⁸ Tri Wiidayati. Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Desa. Jurnal Ilmiah Visi PTK-PNF.Vol. 1 No.1, 2006, hlm. 58.

Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terbukti jika dilansir dari demografi kependudukan yang ada di Desa Cinta Rakyat, jika dilihat dari jumlah penduduk di Desa Cinta Rakyat jumlah perempuan menunjukkan 6.804 Jiwa dan laki-laki 7.041 Jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang adalah 13.845 Jiwa. Maka dapat disimpulkan jika dilihat jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Dengan demikian, seharusnya tidaklah sulit bagi perempuan untuk dapat menempati posisi sebagai anggota BPD. Namun, dalam pelaksanaannya hasil yang didapatkan tidak mampu menempatkan seorang perempuan dalam posisi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dilihat dalam tingkat partisipasi perempuan masih sangat rendah dan perlu untuk terus di tingkatkan dengan berbagai hambatan-hambatan yang di hadapi baik dari pemerintah selaku pengambil kebijakan maupun dari perempuan itu sendiri. Hambatan apa yang di hadapi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan perlu segera di carikan solusinya tanpa banyak pertimbangan.

Menurut penjelasan dari bapak Aji Kurnedi selaku bidang Kaur Umum Desa Cinta Rakyat dan sekaligus panita pemilihan BPD, ada beberapa faktor penyebab mengapa di Desa Cinta Rakyat tidak ada satupun calon anggota BPD dari perempuan, antara lain:¹²⁹

“Kurangnya pengetahuan perempuan, karena pada umumnya masyarakat Desa Cinta Rakyat, hanya tamat SMP, Sekaligus masih adanya budaya maupun pandangan di masyarakat bahwa perempuan cukup di rumah saja

¹²⁹ Aji Kurnedi, Kaur Umum Desa Cinta Rakyat dan sekaligus panitia pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah, suami dan anak”.

Senada dengan hasil wawancara Kaur Pemerintahan yaitu Wulandari di Desa Cinta Rakyat menjelaskan bahwa:¹³⁰

“Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki”

Dilihat dari hal diatas, pada umumnya kaum perempuan, seolah menjadi mindset bersama bahwa pihaknya adalah pihak kedua setelah lelaki tidak sepenuhnya benar dan harus dilakukan upaya untuk mengurangi mindset tersebut. Tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen desa karena masih adanya keraguan dari pihak perempuan itu sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia politik. Alasan lainnya disebabkan pemikiran perempuan yang tertanam dalam benaknya bahwa politik itu tidak harmonis, adanya sengketa ideologi, keras, dan banyak lagi label negative, apalagi sekarang didukung oleh pihak media massa yang tidak pernah berhenti untuk menyorot kegiatan politik di parlemen desa, dan sorotan-sorotan itu justru menjadi pemicu penilaian negatif terhadapnya. Tidak heran jika banyak wanita berpendapat bahwa politik harus menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Budaya patriarki terlihat jelas masih mengakar kuat dalam pemikiran masyarakat Indonesia.¹³¹

¹³⁰ Wulandari, Kaur Pemerintahan dan sekaligus panitia pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

¹³¹ Dedi Kurnia Syah Putra, “Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme media dan Publik”, Jurnal Hukum, Vol.IX, Maret 2019, hlm. 97-98.

Dapat disimpulkan dari data atas, dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri karena nilai patriarki masih cukup kental dalam masyarakat di Desa Cinta Rakyat. Nilai atau budaya tersebut memang sangat sulit untuk di hilangkan.

Budaya patriarki masih melekat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa laki masih pada posisi paling atas karena hampir semua masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem patriarki sehingga posisi perempuan perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam msyarakat bahkan pemerintahan. Dan awal munculnya budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu dan budaya patriarki juga muncul dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.¹³²

Sehingga jika ditelaah terhadap peran perempuan dalam mengikuti politik dengan melihat asumsi dasar di atas masih sangat kurang. Pembicaraan lain yang menjadi kendala utama adalah adanya cara pandang yang patriarki oleh laki-laki, bahkan mayoritas kaum perempuan sendiri masih dikuasai oleh cara pandang dan memperlakukan perempuan secara patriarki. Budaya patriarki dikalangan masyarakat mengakar dan mendominasi tiap ruang kehidupan keseharian, tentu ini di adopsi oleh masyarakat konvensional. Masyarakat yang masih kuat memegang kuat adat dan

¹³² Freedik Laambertus Kollo, *Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik*, (Yogyakarta: Konfrensi Nasional Kewarganegaraan, 2017), hlm, 316.

budaya murni. Iklim dominasi kaum laki-laki sangat kuat meskipun dibenarkan bahwa laki-laki hadir sebagai dominator, lihat saja kehidupan di Desa Cinta Rakyat ini masih mengakarnya budaya patriaki yang mana label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental dengan nuansa pihak lemah.¹³³

Pada dasarnya, perempuan memiliki hak secara penuh terhadap pemenuhan kebutuhan tentang dirinya, termasuk berpolitik. Hasrat sebagai manusia, kesamaan akan kebutuhan membenarkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi ini. Kontestasi politik tidak menitik beratkan pada pembatasan gender, namun beradu dalam ruang kompetensi, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menembus posisi kepemimpinan maka ia akan disebut layak sebagai pemimpin, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting suatu bangsa. Namun, realitas terjadi, perempuan masih tersekat dengan tidak adanya ruang aktualisasi politiknya.¹³⁴

Disisi lain dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Pangmujiatno selaku ketua dalam pembentuk BPD di Desa Cinta Rakyat, didapatkan keterangan bahwa:¹³⁵

“Pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat dilakukan dengan musyarah mufakat yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa, toko masyarakat dan kepala dusun serta toko masyarakat perwakilan dusun. Sebelum adanya musyawarah yang dilakukan kepala desa telah membentuk tim panitia pembentuk BPD yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dengan ditetapkan

¹³³ *Ibid*, hlm.317.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 100

¹³⁵ Pangmujiatno, Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 02 September 2021.

melalui keputusan Kepala Desa. Pemilihan anggota dilakukan dengan pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih”.

Namun dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pemilih dari perwakilan Dusun X Desa Cinta Rakyat yaitu Legito, ia mengatakan:¹³⁶

“Kurangnya informasi yang didapat bahwa akan diadakan pemilihan anggota BPD di desa Cinta Rakyat, panitia tidak menyebarkan luas informasi tersebut di Desa Cinta Rakyat, namun panitia hanya melengketkan informasi sepotong surat dikantor desa. Maka masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya pemilihan BPD, maka dipastikan dalam hal ini masyarakat khususnya perempuan tidak banyak mengetahui informasi ”

Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat yang disimpulkan, karena pernyataannya sama, mereka mengatakan bahwasannya:¹³⁷

“Panitia pembentukan BPD kurang mensosialisasikan bahwasannya harus ada (wajib) keterwakilan perempuan yang menduduki Anggota BPD Di Desa Cinta Rakyat, sehingga kami tidak mengetahui mengenai aturan yang telah diberlakukan, oleh karena itu perempuan tidak antusias mengikuti untuk mencalonkan anggota BPD”.

Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh Bapak Erwanto, selaku anggota panita penetapan BPD Di Desa Cinta Rakyat:¹³⁸

“ia kurang mengetahui dasar hukum teknis pemilihan sehingga ia mengakatan bahwasanya pemilihan BPD dilakukan seperti pemilih pada umumnya, sehingga siapapun yang mendaftarkan diri menjadi calon dan lolos dalam peyeleksian maka dia bisa menjadi calon BPD yang akan dipilih nantinya, dan seputar sosialisasi kepada masyarakat ia juga mengatakan bahwasannya panita memang tidak ada mensosialisasikan mengenai sistem pemilihan maupun siapa saja yang akan duduk menempati BPD, sehingga

¹³⁶ Legito, Tokoh Masyarakat Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, 03 September 2021.

¹³⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat dusun VII, X, dan IX, ibu fatemih dan suriyani, Bapak Akbar, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

¹³⁸ Erwanto, Anggota Panitia Penetapan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, 03 September 2021.

saya sendiripun baru mengetahui bahwasannya harus ada keterwakilan perempuan yang menempati kedudukan dalam BPD.”

Oleh karena itu, dari panitia penetapan BPD di Desa Cinta Rakyat tidak memahami aturan yang sebagaimana menjadi dasar acuan dalam pemilihan BPD yang harus adanya keterwakilan perempuan minimal satu orang, yang saat di tanya banyak tidak mengetahui mengenai dasar hukum acuan pemilihan BPD, maka inilah yang paling fatal namun terjadi di pemerintahan Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut sei tuan, maka bagaimana panitia penetapan BPD Desa Cinta Rakyat dapat mensosialisasikan serta mengimplementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat taersebut sedangkan mereka tidak megetahui dasar aturan dalam pemilihan BPD sehingga inilah salah satu penyebab utamanya.

Dari hasil penelitian yang penulis amati dari faktor external diatas dapat disimpulkan bahwa belum adanya calon perempuan dalam keanggotan sebagai anggota BPD dikarnakan kurangnya informasi dan sosialisasi bahwa di dalam Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun dalam kenyataanya masyarakat belum mengetahuinya, karena Panitia Pemilihan BPD tidak memberi tahu bagaimana seharusnya yang akan duduk dalam pemilihan tersebut, sehingga tidak ada yang mendaftar seorangpun perempuan untuk mewakili anggota BPD di desa Cinta Rakyat. Oleh sebab itu, dalam pemilihan di Desa Cinta Rakyat masyarakat hanya memilih calon yang menurut mereka mampu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa memperhatikan dan melihat ada atau tidaknya keterwakilan perempuan. Sehingga hasilnya pun di dapatkan adalah laki-laki.

B. Kondisi/Keadaan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Ketika membahas mengenai kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, pasti tak luput dari berbicara politik, maka harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.¹³⁹

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakatnya sendiri.¹⁴⁰ Dalam QS. al-nisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

¹³⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan. 2002), hlm.189

¹⁴⁰ Fatiimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm.170.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)¹⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang pemimpin atau lembaga perwakilan. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan, baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.

Namun keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cinta Rakyat tidak ada yang mendaftar/kosong untuk keterwakilan perempuan, sehingga hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan yang terpilih dalam BPD, maka otomatis perempuan tidak ada yang menduduki kursi BPD. Karena perempuan memilih sesuai dengan pandangannya dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat adalah perempuan menunjukkan sifat yang acuh tak acuh atau tidak peduli pada saat pemilihan BPD melihat tidak ada wakil perempuan tidak ada seorangpun yang mencalonkan, karena pada umumnya mereka kurang mendapat informasi dan sosialisasi, maka mereka tidak memperhatikan ada atau tidaknya perempuan yang mencalonkan diri dan mereka hanya berpandangan bahwa mereka sebagai pemilih melaksanakan tugasnya memilih tanpa memperhatikan ada atau tidaknya keterwakilan perempuan, padahal pada umumnya keterwakilan perempuan adalah untuk memperjuangkan hak politik perempuan sendiri.

¹⁴¹ Kementrian agama, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm.180.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ibu fatemih yaitu masyarakat dari dusun X, ia mengatakan:¹⁴²

“Saya pada saat pemilihan BPD dibalai Desa Cinta Rakyat saya tidak melihat adanya keterwakilan perempuan, kemudian saya juga baru tahu ternyata memang harus ada keterwakilan perempuan di dalam BPD untuk menyuarakan perempuan, yang saya tau pada saat pemilihan saya hanya melihat calon-calonnya semua laki-laki maka saya memilih menurut saya bisa mewakili masyarakat, dan sebelumnya memang belum ada sosialisasi dari Desa mengenai keterwakilan perempuan maka saya memandang siapapun yang akan duduk maka sama saja nantinya”

Selanjutnya menurut ibu suriani warga dusun VIII Desa Cinta Rakyat, ia mengatakan:¹⁴³

“Untuk siapapun yang terpilih pada umumnya semuanya sama aja yang dirasakan masyarakat, maka mau ada keterwakilan perempuan atau tidak rasanya semua sama tidak ada bedanya”.

Sepemahaman dari hasil wawancara dari lastri Mujinah Dusun IX Desa Cinta Rakyat, ia mengatakan:¹⁴⁴

“Warga Desa Cinta Rakyat merasa acuh tak acuh dalam hal pemilihan anggota BPD, hal ini di dasarkan pada : 1) kurangnya sosialisasi dari pemerintahan Desa mengenai pemilihan anggota BPD serta masih belum transparansinya informasi mengenai lembaga pemerintahan di Desa tersebut. 2) Kurang terbukanya informasi oleh aparaturnya Desa juga merupakan salah satu indikator penyebab masyarakat bersikap apatis terhadap pemilihan anggota BPD di Desa ini”.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam

¹⁴² Fatemih, Tokoh Masyarakat Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

¹⁴³ Suriani, Tokoh Masyarakat Dusun VIII Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

¹⁴⁴ Lastri, Masyarakat Dusun IX Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

Pemilihan BPD Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh secara etimologi berasal dari kata Faqaha-yafqahu-fiqhan berarti paham yang mendalam.¹⁴⁵ Sedangkan secara terminologi menurut wahbah az-Zuhaili mendefenisikan fiqh adalah :¹⁴⁶

الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.”

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. maka, pengertian ini menandakan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.¹⁴⁷ Secara terminologi, siyasah didefenisikan oleh oleh para ahli diantaranya Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *“siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan”*.¹⁴⁸ Louis Ma’ruf menyatakan bahwa *“siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”*. Ibn Manzhur

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: P3M, 2005), hlm. 15.

¹⁴⁶ Arianti, *Ushul Fiqh*, diambil dari <https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh>, Pada tanggal 3 September 2021, Puku. 10.12 Wib.

¹⁴⁷ Ibn Manzhur, *lisan al-arab*, juz 6 (Birut: Dar al-shadr, 1968), hlm. 108.

¹⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-syari’yyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 4-5

mengartikan siyasah adalah “*mengatur atau memimpin sesuatu yang megantarkan manusia ke pmtu kemashlahatan*”.¹⁴⁹

Dari pengertian fiqh dan siyasah diatas, maka dapat diartikan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu kajian hukum islam yang membahas dan membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. ¹⁵⁰Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok fiqh siyasah adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kekuasaan.¹⁵¹

Dalam Fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara. Maka dalam hal yang berhubungan terhadap implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakiilan perempuan dalam pemilihan BPD ini termasuk kedalam kajian Siyasah Dusturiyah. Menurut Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya “*Konstektualisasi doktrin politik islam*” Siyasah Dusturiyah adalah bagian

¹⁴⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah(Konstektualisasi doktrin politik islam)*, *Ibid*, hlm.4.

¹⁵⁰ *Ibid*.

¹⁵¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm.2-3.

fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain peneran legislasi (menerapkan bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan unuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Karena itu, objek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran islam.¹⁵²

Dalam kajian fiqh siyasah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif ditingkat desa dikatakan sama dengan *ahlu al-halli wa al aqdi*. *Ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.¹⁵³ Karena *ahlu al-halli wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Karena itu keberadaan *ahlu al-halli wa al-aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah:¹⁵⁴

1. Memilih dan membaiaat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

¹⁵²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah(Konstektualisasi doktrin politik islam)*, Ibid, hlm.177.

¹⁵³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,Ibid*, hlm. 28

¹⁵⁴Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah*, Skrpisi Sarjana, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 8

3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun tugas *ahlu al-halli wa al-aqdi* selanjutnya yaitu bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang, menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah islam terutama Al-Quran dan sunah.¹⁵⁵

Dengan demikian, implementasi permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat dalam hal ini masuk kedalam Siyasah Dusturiyah bagian *tashri'iyah* adalah salah satu bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas dan mengkaji tentang kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga legislatif.¹⁵⁶ Sehingga ruang lingkup Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.¹⁵⁷

Kedudukan perempuan dalam fiqh siyasah merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 10

¹⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi doktrin politik islam)*, *Ibid*, hlm.187.

¹⁵⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, *ibid*, hlm.41

membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkannya perempuan berpolitik. Pendapat liberal-progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki.

Pada awal Islam, kiprah politik perempuan tidak asing lagi bagi kita, setidaknya dipahami bahwa peran politik para sahabat perempuan adalah merupakan langkah positif, dibolehkan oleh ajaran Islam; artinya tidak diharamkan.¹⁵⁸

Dalam pandangan agama pun juga tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk berperan dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan.¹⁵⁹ Hal tersebut senada dengan apa yang telah termaktub dalam Al-quran dimana antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang dibedakan antara memilih atau dipilih untuk dapat mengatur urusan masyarakat (umum), seperti yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka

¹⁵⁸ Zaiitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 110.

¹⁵⁹ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan kekuasaan*, *Ibid.*, hlm.113.

akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (At-Taubah : 71).¹⁶⁰

Oleh sebab itu, tidak ada nash secara jelas yang melarang keterwakilan perempuan didalam lembaga perwakilan BPD. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten dari pada yang kurang kompeten. Sehingga hal ini sesuai dengan firman allah Q.s An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa ayat 58).¹⁶¹

Sehingga makna kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan yaitu bahwasannya Ibnu Hazm berkata:

“Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kisra yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin”.¹⁶²

¹⁶⁰ Javan Labs, *Surah At-Taubah Ayat 71*, diakses dari <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-71>, Pada 04 september 2021, Pukul 12.06 Wib.

¹⁶¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara: Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema), hlm.363

¹⁶² Basse Agus Susanti, *Aspek Perlindungan Hukum Perempuan Berpolitik Di Indonesia Dan Fikih Siyasah (Analisis Perbandingan)*, Skripsi Sarjana (Makasar: UIN Alauddin, 2018), hlm. 61.

Dapat disimpulkan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Dengan demikian seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat sesuai amanah Q.s An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).*¹⁶³

Berdasarkan ayat Q.S An-Nisa':59 menegaskan bahwasannya harus mentaati pemimpin, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan keterwakilan perempuan yang harus duduk dalam BPD yang dengan ayat diatas dapat dilihat harus dilaksanakan, karena tujuan peraturan perundang-undangan dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah.

Dari pandangan fiqh siyasah dusturiyah seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di

¹⁶³ Ayunda, *Tafsir Ayat Surah an-nisa 59*, diambil dari <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Pada tanggal 04 September 2021, Pukul 10.50 Wib.

dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk kedudukan keterwakilan perempuan. Sehingga jika tidak ada yang mewakili perempuan hak perempuan merasa merugi karena sejatinya keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pastinya memperjuangkan hak-hak perempuan dan politik perempuan dapat lebih mudah diperhatikan, karena yang mengetahui kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Namun kenyataannya yang terjadi pada BPD di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki keanggotaan BPD, sehingga implementasi permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, belum terlaksa di Desa Cinta Rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan BPD Di Tinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat belum terlaksana. Sebab tidak ada perempuan yang mencalonkan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, oleh karena itu otomatis tidak ada yang menduduki sebagai keterwakilan perempuan dalam BPD, sehingga dinilai tidak menjadikan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat sebagai pedoman. Hal ini jika dilihat karena adanya faktor internal dan eksternal adalah Budaya patriarkis masih cukup kental dalam masyarakat di Desa Cinta Rakyat yaitu lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan menganggap belum pantas menjadi lembaga BPD selagi masih ada laki-laki, Kemudian ketidaktahuan panitia pemilihan BPD mengenai aturan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD yang harus menduduki minimal satu orang keterwakililn perempuan dan apalagi masyarakat Desa Cinta

Rakyat karena tidak ada informasi dan sosialisasi dari panitia pemilihan BPD karena panitia pemilihan BPD sendiripun kurang paham mengenai aturan tersebut, padahal keterwakilan perempuan untuk memperjuangkan hak perempuan sebab pada umumnya yang mengetahui tentang perempuan adalah perempuan sendiri.

2. Kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat yaitu keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cinta Rakyat tidak ada yang mendaftar/kosong untuk keterwakilan perempuan, sehingga hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan yang terpilih dalam BPD, maka otomatis perempuan tidak ada yang menduduki kursi BPD, karena perempuan menunjukkan sifat yang acuh tak acuh atau tidak peduli pada saat pemilihan BPD melihat tidak ada wakil perempuan yang mencalonkan, hal ini didasarkan pada : 1) Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan Desa mengenai pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat. 2) Kurang terbukanya informasi oleh aparat Desa juga merupakan salah satu indikator penyebab masyarakat bersikap apatis terhadap pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat. Sehingga pemilih perempuan tidak memperhatikan ada atau tidaknya keterwakilan perempuan yang mencalonkan diri dan hanya berpandangan bahwa sebagai pemilih melaksanakan tugasnya memilih tanpa memperhatikan ada atau tidaknya keterwakilan perempuan, padahal pada umumnya keterwakilan perempuan adalah untuk memperjuangkan hak politik perempuan sendiri.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat masuk kedalam konteks pembahasan siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah perundang-undangan negara. Namun dalam hal ini siyasah dusturiyahnya masuk kedalam bagian *tashri'iyah* adalah salah satu bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas dan mengkaji tentang kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan hukum oleh lembaga legislatif. Sehingga hasil penelitian menunjukkan implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di desa cinta rakyat pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Karena kurang patuhnya masyarakat dan panitia pemilihan BPD kepada peraturan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam islam sudah dikatakan setiap orang wajib mematuhi peraturan jika sudah memenuhi syar'i. Kerena pada dasarnya sebuah kebijakan di buat adalah untuk di patuhi, sehingga dapat mencapai kemaslahatan dalam bernegara maupun bermasyarakat. Sehingga seharusnya suatu lembaga pemerintahan dan masyarakat harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Namun kenyataanya yang terjadi pada BPD di Desa Cinta Rakyat dapat dilihat tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki keanggotaan BPD, sehingga aturan tersebut belum terlaksa di Desa Cinta Rakyat.

B. SARAN

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar implementasi Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat dapat dilaksanakan dengan efektif, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, pemerintahan Desa harus menetapkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD sesuai dengan amanat Permendagri No.110 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam menetapkan keanggotaan BPD di Desa Cinta Rakyat.
2. Untuk mengantisipasi jika tidak ada keterwakilan perempuan yang terpilih dalam BPD seharusnya pemerintah pembuat undang-undang harus menambahkan pasal yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi tegas yang harus diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 jika tidak adanya keterwakilan perempuan yang menduduki kursi BPD.
3. Untuk mencapai apa yang diinginkan Fiqh Siyasah, seharusnya implementasi Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di desa cinta rakyat pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Karena kurang patuhnya masyarakat dan panitia pemilihan BPD kepada peraturan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam islam sudah dikatakan setiap orang wajib mematuhi peraturan jika sudah memenuhi syar'i, karena pada dasarnya kebijakan di buat untuk di patuhi. Dalam islam pun tidak melarang perempuan yang terpenting mau & mampu mengemban amanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- Al-qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*. Jakarta: al-kautsar, 2008.
- Anugrah, Astrit. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- A.W.Widjaja. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Budiarjo, Mariam. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Butar Butar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Cholisn dan Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan Dan Kekuasaan*. Jakarta: Amzah, 2002.
- Fauziah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Jilid 2*. Yogyakarta: Andy Offset, 1986.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi doktrin politik islam)*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2014.
- J Lexy. *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007.

- Jailani, Imam Amrusi,dkk.*Hukum Tata Negara Islam*.Surabaya: IAIN Press,2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara: Al-quran dan Terjemahannya*. Jakarta:PT.Sygma Examedia Arkanleema.
- Khaliq, Farid Abdul.*Fikih Politik Islam*.Jakarta: Amzah, 2005.
- Kolllo, Freedik Laambertus. *Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik*.Yogyakarta: Konfrensi Nasional Kewarganegaraan, 2017.
- Marzuki, Peter Muhammad.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhaimin.*Metode Penelitian Hukum*.Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir.*Hukum Dan Penelitian Hukum*.Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2004.
- Muslikhati,Siti.*Faminisme dan Pemberdayaan Prempuan Dalam Timbangan Islam*.Jakarta:Gema Insani, 2004.
- Nurcholis, Hanif.*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasyid, Ryas.*Memaahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi lain dari hukum di indonesia*.Jakarta: Kompas,2003.
- Sadzali, Munawir.*Islam dan tata negara ajaran sejarah dan pemikiran*.Jakarta: UI Press, 2004.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: balai Pustaka, 2004.
- Sinaga, Rosmaida. Lister Eva Simangunsong dan Syarifah, *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*.Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Solekhan, Moch.*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.Malang: Setara Press.2014.
- Subhan, Zaiitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*.Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Susanti, Basse Agus. *Aspek Perlindungan Hukum Perempuan Berpolitik Di Indonesia Dan Fikih Siyasah (Analisis Perbandingan)*, Skripsi Sarjana. Makasar: UIN Alauddin, 2018.

- Syarif Khamami Zana, Mujaer Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syuhqah, Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Umar, Nasaruddin. *Akhlak Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*. Jakarta: Restu Illahi, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Desa. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Utami, Tari Siwi. *Perempuan Politik di Parlemen*. Yogyakarta: Gama Media. 2011.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wahab, Soelihin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yazid, Imam. *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh*. Medan: Cv Manhaji, 2007.

B. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI

- Arisca, Enggita. *Implementasi Musyawarah Pemilihan/Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Masam Bulu, Kab.Lahat*, Skripsi Sarjana. Universitas Sriwijaya Indralaya : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2020.
- Cahaya, Merly. *Pendidikan Generasi Bangsa Indonesia*. Vol II No.1, Desember 2019.
- Erick, Benni. *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora (JSH), Vol.3, No.2, Desember 2020.
- SyahPutra, Dedi Kurnia. "Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis \square Mutualisme media dan Publik". Jurnal Hukum, Vol.IX, Maret 2019.
- Firdaus, Akmal. *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah*, Skripsi Sarjana. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Firwaan, May. *Peran Serta Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbaag) Di Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Paanjang*

- Kabupaten Tanjung Jaabung Timur. Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.*
- Hakim, Dimas Luqmanul.*Peran Prempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa Didesa Gunung Tumpeng Kec.Suruh Dan Desa Bantal Kec.Bancak, Kab.Semarang, Jurnal Politik, Vol.2,No.1, Dapartemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro, maret 2009.*
- La Samsu, *Al-Suultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, Tahkim, Vol.XIII, No.1, Juni 2017.*
- Muhaimin, Ahmad.*Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta.Jurnal Politik, Februari,2016.*
- Nawawi Lubis, Rahmad.*Analisis Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014, Skripsi Sarjana, Medan: UIN-SU Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), 2019.*
- Ramadani, dkk, *Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perda Jota Medan No. 6 Tahun 2013 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan, Vol.6, No.5 Tahun 2018.*
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.*
- Ola Bali, Akhmad. *Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lewopulo, Kec.Witihama, Kab. Flores Timur, Provinsi NTT, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD, 2018.*
- Prayoga, Andrian.*Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Skripsi Sarjana.Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2008.*
- Sukhoyya, Ahmaad Widan ,dkk.*Pemilihan Wanita Dalam Permusyawarataan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.Jurnal Of Law, Vol.7 No.1 2018.*

C. INTERNET

Arianti, *Ushul Fiqh*, diambil dari <https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh>, Pada tanggal 3 September 2021, Puku. 10.12 Wib.

Ayunda, *Tafsir Ayat Surah an-nisa 59*, diambil dari <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Pada tanggal 04 September 2021, Pukul 10.50 Wib.

Javan Labs, *Surah At-Taubah Ayat 71*, diakses dari <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-71>, Pada 04 september 2021, Pukul 12.06 Wib.

Nasution, Mirza. Badan Permusyawaratan Desa, diambil dari <https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/37>, pada tanggal 29 April 2021, Pukul 09.00 Wib.

Nurhikmah, Hak-hak politik iwanita dalam islam, diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/285729-hak-hak-politik-wanita-dalam-islam-e9744c2a.pdf>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021 Pukul 10.20 Wib.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) RI No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diakses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-110-2016-badan-permusyawaratan-desa>, diunduh pada tanggal 06 Mei 2021, Pukul 14.20 Wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 “*Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diunduh pada tanggal 04 Mei 2021, pukul 21.30 WIB.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, diambil dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diunduh pada tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.30 Wib.

Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari [https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#:~:text=UU%206%20tahun%202014%20tentang%20Desa%20\(UU%20Desa\)%20menyebutkan%20bahwa,pemerintahan%2C%20kepentingan%20masyarakat%20setempat%20berdasarkan](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa#:~:text=UU%206%20tahun%202014%20tentang%20Desa%20(UU%20Desa)%20menyebutkan%20bahwa,pemerintahan%2C%20kepentingan%20masyarakat%20setempat%20berdasarkan), diunduh pada tanggal 05 Mei 2021, Pukul 10.20 Wib.

Zahrani, Al-Quran Surat Az-Zariyat Ayat 56, diambil dari <https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>, diunduh Pada tanggal 14 Juni 2021, Pukul 12.03 Wib

D. WAWANCARA

Aji Kurnedi, Kaur Umum Desa Cinta Rakyat dan sekaligus panitia pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Akbar, Toko Masyarakat Dusun V, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 03 September 2021.

Ending, Kepala Dusun III Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Erwanto, Anggota Panitia Penetapan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, 03 September 2021.

Fatemih, Tokoh Masyarakat Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

Firmansyah, Kepala Dusun V Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021

Kliwon, Anggota BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Lastri, Masyarakat Dusun IX Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

Legito, Tokoh Masyarakat Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, 03 September 2021.

Miswandi, Anggota BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Nurman Bagong, Kepala Dusun X Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Pangmujiatno, Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 02 September 2021.

Suhendri, Toko Masyarakat Dusun II, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Sujarno, Anggota BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Sulastri, Sekretaris Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi. Cinta Rakyat, 01 September 2021.

Suriani, Tokoh Masyarakat Dusun VIII Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 04 September 2021.

Wati, Toko Masyarakat Dusun VII, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

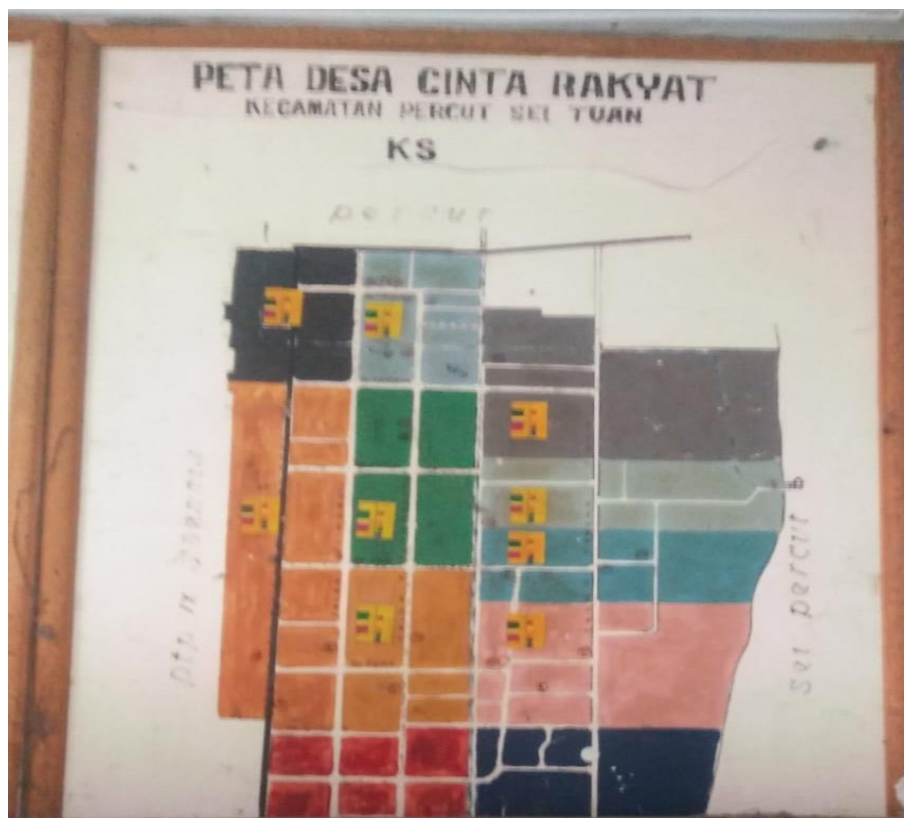
Wulandari, Kaur Pemerintahan dan sekaligus panitia pemilihan BPD Desa Cinta Rakyat, Wawancara Pribadi, Cinta Rakyat, 01 September 2021.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN

A. PROFIL DESA CINTA RAKYAT



Ket: Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang



Ket: Peta Desa Cinta Rakyat

			REKAPITULASI POTENSI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN - KAB. DELI SERDANG TAHUN 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NO	NAMA KEPALA DESA	WILAYAH	PENDUDUK			JUMLAH	AGAMA			PEKERJAAN			PERTANIAN	PETERNAKAN			HOME INDUSTRI			INDUSTRI	TEMPAT IBADAH	POS KESEHATAN			TEMPAT PENDIDIKAN			OBJEK VITAL	PERLENGKAPAN PERHUB. DARAT/UDARA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			WNI	WNA	WNA		JUMLAH	KK	ISLAM	KRISTEN	BUDHA	PRAJ		KURUS	NYATA	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS			KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS		KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	KURUS	K

Ket: Rekapitulasi Potensi Desa Cinta Rakyat

B. STRUKTUR PEMERINTAHAN



Ket: Bagan Struktur Pemerintahan Desa Cinta Rakyat



Ket: Bagan Struktur BPD Cinta Rakyat

C. FOTO KEGIATAN DENGAN APRATUR DESA CINTA RAKYAT



Ket: Foto Bersama Perangkat Desa Cinta Rakyat



Ket: Wawancara Dengan Sekretaris Desa Cinta Rakyat (Ibu Sulastri)



Ket: Wawancara Dengan Kepala Dusun III (Bapak Samsudin/Ending)



Ket: Wawancara Dengan Kepala Dusun X (Bapak Nurman)



Ket: Wawancara Dengan Kepala Dusun V (Bapak Firmansyah)



Ket: Wawancara Dengan Anggota BPD (Bapak Sujarno)



Ket: Wawancara Dengan Anggota BPD (Bapak Miswandi)



Ket: Wawancara Dengan Anggota BPD (Bapak Kliwon)

D. PANITIA PENETAPAN BPD



Ket: Wawancara Dengan Ketua Panitia Pemilihan BPD (Bapak Pangmujiatno)



Ket: Wawancara Dengan Panitia Pemilihan BPD sekaligus Kaur Bidang Umum (Bapak Aji Kurnedi)



Ket: Wawancara Dengan Panitia Pemilihan BPD (Bapak Erwanto)

E. FOTO KEGIATAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**Wawancara Dengan Bapak Legito****Wawancara Dengan Bang Akbar****Wawancara Dengan Ibu Sulas****Wawancara Dengan Ibu Fatemih**



Wawancara Dengan Ibu Wati



Wawancara Dengan Suhendri



Wawancara Dengan Ibu Suriani

F. SURAT IZIN RISET DARI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1534/FSH.I/PP.00.9/8/2021

30 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala DESA CINTA RAKYAT, KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG**

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tika Puspita Sari
NIM	: 0203171016
Tempat/Tanggal Lahir	: Cinta Rakyat, 26 Mei 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyash)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. KUD DUSUN X CINTA RAKYAT Kelurahan CINTA RAKYAT Kecamatan PERCUT SEI TUAN

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. APDN DUSUN X DESA CINTA RAKYAT, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG., guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI FIQH
SIYASAH (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Medan, 30 Agustus 2021
a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kelembagaan



Digitally Signed
Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

G. SURAT BALAN IZIN RISET DARI DESA CINTA RAKYAT

		PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DESA CINTA RAKYAT
Kantor : Jl. Karya APDN No. 19 Dusun V. Kode Pos – 20371		
Nomor : Lampiran : - Perihal : Izin Riset	Cinta Rakyat, 06 September 2021 Kepada Yth, Bapak Dekan UIN- Sumatera Utara Di -	
Tempat		
Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B.1534/FSH.I/PP.00.9/8/2021, Tanggal 01 September 2021 Perihal: Permohonan Izin Riset di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang dilaksanakan oleh:		
Nama : Nim : Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Judul Skripsi :	TIKA PUSPITA SARI 0203171016 Cinta Rakyat, 26 Mei 1999 Jl. KUD Dusun X Desa Cinta Rakyat IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.110 TAHUN 2016 TENTANG BPD TERHADAP KEDUDUKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN BPD (STUDI DI DESA CINTA RAKYAT, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG)	
Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami Pemerintah Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk mengadakan peninjauan/riset/wawancara yang berhubungan dengan pembuatan skripsi.		
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.		
Cinta Rakyat, 06 SEPTEMBER 2021 KEPALA DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN		
 (SUHENDRO, ST)		

RIWAYAT HIDUP



Tika Puspita Sari yang lahir di Cinta Rakyat, 26 Mei 1999 merupakan putri ketiga dari pasangan H.Adi Kustiono,S.Kp,M.Kes dan Misniarti,S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 104208 Cinta Rakyat, SMPN 3 Percut Sei Tuan, SMAN 1 Percut Sei Tuan, dan saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S1 di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis juga aktif mengikuti beberapa organisasi dalam perkuliahan diantaranya: SEMAF (Senat Mahasiswa Fakultas), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), Mawapres UINSU (Mahasiswa Berprestasi), KAMMI (Komunitas Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), KPS (Komunitas Peradilan Semu), Fokis (Forum Kajian Ilmu Syariah), CMR (Centra Muda Remaja).

Karya tulis dalam bidang pendidikan telah dipublikasikan jurnal, koran serta artikel, koran dan penulis memperoleh beberapa prestasi diantaranya: Juara I Essay Digital Library Uinsu 2019, Juara II Peradilan Semu Fakultas Syariah Dan Hukum 2019, Juara I Internal Mourt Court Fakultas Syariah Dan Hukum 2020, Juara II LKTI Porseni 2020, Juara II Puisi Sumpah Pemuda Febi Festival 2020, Publikasi jurnal: *“Upaya Perumusan sistem rekrutmen hakim konstitusi untuk mewujudkan hakim yang uswatun hasanah”*, Koran Dinamika UINSU *“Ketika Kita Belajar Terdengar Azan Berkumandang”*, Artikel Online Bicara Indonesia *“Pilkada Tak Henti, Walau di Tengah Pandemi”*.